



### **1.1. Latar Belakang**

Secara harfiah definisi komunikasi adalah interaksi antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi. Komunikasi secara umum bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain. Informasi yang memiliki nilai dan manfaat bagi penerimanya dapat ditafsirkan sebagai pengetahuan. Jika hasil dari ilmu adalah tindakan bukanlah pengetahuan maka sebaliknya informasi yang diberdayagunakan adalah ilmu dari pengetahuan.

Fakta Ilmu pengetahuan dan teknologi berpotensi mengubah tatanan dunia adalah sebagaimana terjadi revolusi industri generasi 1.0 ketika tenaga manusia dan hewan tergantikan mesin bertenaga uap. Sejarah mencatat belum pernah terjadi, rakyat biasa meningkatkan pendapatan dan berhasil mengangkat naik perekonomian secara dramatis selama dua abad revolusi industri generasi 1.0 dimulai, dimana pendapatan rata - rata perkapita Negara - negara didunia naik hingga enam kali lipat. Memasuki awal abad ke 20-an dilanjutkan revolusi industri generasi 2.0 dengan ditemukannya tenaga listrik dan tenaga motor sebagai sumber tenaga utama. Inilah pemicu awal mula kemunculan pesawat telepon dalam kehidupan manusia dimana perkembangan kedepannya menghadirkan teknologi digital dan internet sebagai tanda datangnya revolusi industri generasi 3.0. Perkenalan dengan internet mengantarkan manusia pada era revolusi industri generasi 4.0 untuk penyebutan era Internet untuk Segala (IoT); penciptaan sebuah kecerdasan buatan pada sistem sehingga dapat menghubungkan komunikasi antara manusia dengan alat (sistem informasi)

Melihat kecenderungan gejala di atas dari sudut pandang ilmu pemerintahan yang dianggap sebagai suatu cara pendekatan untuk mempelajari dan menyiasati bagaimana melaksanakan pengaturan, pengurusan, pemantauan, kepemimpinan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun pemerintah dan rakyatnya) dalam berbagai peristiwa terhadap situasi dan kondisi.



Oleh karena itu selayaknya proses penyelenggaraan pemerintahan menyesuaikan dinamika yang ada.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mendefinisikan bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan Perangkat kerja milik Daerah mengimplementasikan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk 5 (lima) tahun kedepan ditampilkan secara proyeksi pada Rencana Strategis/Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan rentang waktu tahun 2019 - 2023 dan sebagai arah Rencana Kerja Tahunan (RKT) oleh perangkat daerah untuk program dan kegiatan selama satu tahun.

Sesuai amanat Undang-Undang serta selaras pada Visi Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode Tahun 2019 – 2023, yakni:

**“SUMATERA SELATAN MAJU UNTUK SEMUA”**

Dalam rangka untuk mewujudkan visi, maka ditetapkanlah beberapa misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yakni :

1. Membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif;
4. Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta



mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah;

5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan didukung fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pada pariwisata religius.

Perwujudan gambaran Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan sangat ideal jika dalam rangka sinkronisasi percepatan dalam visi memberdayakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dapat berperan strategis dan dominan dalam menggambarkan visi tersebut. Hal ini dikarenakan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) memiliki ruang lingkup tanpa batas dalam menjangkau setiap sektor tanpa harus memasuki ranah sektor tersebut. Lebih tepatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mampu mengoptimalkan sistem penyelenggaraan pemerintahan melalui tata kelola perubahan, pengetahuan, pengawasan serta pada proses bisnis dengan melakukan pergeseran terhadap pola tatap muka konvensional yang selama ini digunakan dalam mengantisipasi segala kebutuhan dan keperluan pemerintahan, publik, stakeholder terkait sampai dengan kalangan dari dunia usaha berbagai kegiatan terhubung pemerintahan.

Menanggapi hal ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Sistem tata kelola e-government atau Sistem Pegawai Basis Elektronik sebagai implementasi dari Maju layanan digital dan juga hal lainnya seputar penerapan ilmu Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah merupakan pilihan tepat dan agar dilaksanakan bersama dari dan untuk semua golongan, elemen dalam hubungan pemerintahan guna percepatan pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam kerangka;

### **“SUMATERA SELATAN MAJU UNTUK SEMUA”**

Sesuai pemahaman di atas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan selaku pengemban tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Provinsi bidang komunikasi dan informatika,



persandian dan statistik yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sejalan dengan misi dari RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2023 yakni;

### **MISI III**

*“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang di dukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsive”*

### **MISI IV**

*“Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saling daerah dengan memperitmbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah”*

Seiring pesatnya perkembangan di bidang Komunikasi dan Informatika, oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan perangkat daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Sektoral dengan menuangkan program dan kegiatan kedalam dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan Tahun 2019 adalah kewajiban bagi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan guna mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tersebut, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yang terbentuk dua tahun lalu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan,



melakukan proses penyusunan rencana pengambilan langkah-langkah strategis menuju;

## **“SUMATERA SELATAN MAJU UNTUK SEMUA”**

### **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019–2023 berdasar pada :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 18 ayat 6 tentang Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembentukan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Bagian Kedua, Statistik Sektoral Pasal 12);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;



11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Thn 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi



- Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur  
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
  22. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No. 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
  23. Peraturan Daerah Sumatera Selatan No. 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;
  24. Peraturan Daerah No.14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
  25. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
  26. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
  27. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sumsel Smart Province;
  28. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 63 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  29. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 4 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menetapkan isu dan strategi berdasarkan uraian pokok pembahasan urusan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik dengan penjabaran disesuaikan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Sumatera Selatan.



## **b. Tujuan**

1. Menjadi arah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);
2. Memberikan gambaran berkelanjutan Rencana Kerja Tahunan (RKT);
3. Sebagai tolak ukur kapasitas kinerja dari tahun ke tahun.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2023 disusun berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkaitan dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah berkenaan Rencana Kerja Perangkat Daerah

#### **1.2. Landasan Hukum**

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

### **Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan



peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

**Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Analisis isu-isu strategis berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

**Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan**

Berisi Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

**Bab V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**Bab VI Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Kepada Tujuan Dan Sasaran RPJMD**

Berisi indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang hendak dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.

**Bab VII PENUTUP**

**LAMPIRAN**



## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Komunikasi dan Informatika, serta bidang Persandian dan Statistik.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian;
- c. Penlaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan dan Informatik
- d. penyelenggaraan ekosistem TIK (Smart Province), layanan nama domain dan sub domain lembaga, pelayanan publik;
- e. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumberdaya TIK pemerintah dan masyarakat lingkungan Provinsi;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Komunikasi dan Informasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian; dan



- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

## 1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang Komunikasi dan Informatika serta Bidang Persandian dan Statistik. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkungan Pemerintah Provinsi, Pengelolaan Informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan informasi data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumberdaya TIK pemerintah dan masyarakat lingkungan Provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkungan Pemerintah Provinsi, Pengelolaan Informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan



- hubungan media, penguatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan informasi data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, persandian dan
- c. layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumberdaya TIK pemerintah dan masyarakat lingkungan Provinsi;
  - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkungan Pemerintah Provinsi, Pengelolaan Informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan informasi data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumberdaya TIK pemerintah dan masyarakat lingkungan Provinsi;



- e. Pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik Negara/Daerah;
- f. Pembinaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

## 2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hukum, pendidikan, keuangan, perencanaan, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, serta bidang persandian dan statistik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan tata usaha, rumah tangga perlengkapan, hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. Pelaksanaan tata usaha keuangan;
- d. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembangunan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- e. Penyusunan program kegiatan rutin pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- g. Pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretaris, membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Kepegawaian.



- a. **Subbagian Perencanaan**, mempunyai tugas:
1. Membuat rencana, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
  2. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja tahunan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
  3. Mengkoordinasikan usulan program tahunan komunikasi, informatika, persandian dan statistik dengan instansi lain;
  4. Menyiapkan usulan penetapan Kepala Satuan Kerja Pembangunan dan pimpinan pelaksana kegiatan di bidang bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
  5. Mengevaluasi dan mengkoordinasikan usulan program pembangunan komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis Vertikal maupun Badan Usaha Milik Negara di lingkungan komunikasi, informatika, persandian dan statistik di daerah sebelum ditampung dalam program Pemerintah Provinsi dan atau diusulkan ke Pemerintah Pusat;
  6. Menyusun dan mengkoordinasikan rencana pembangunan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik jangka menengah dan jangka panjang;
  7. Membuat rencana pengembangan jaringan dan pelayanan jasa komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
  8. Membuat dokumen-dokumen bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik berupa kinerja sarana dan prasarana komunikasi, informatika, persandian dan statistik, Renstra dan dokumen lainnya;
  9. Menyiapkan usulan teknis pembangunan dan pengembangan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
  10. Mengkoordinasikan temuan dan tindak lanjut laporan hasil temuan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan



- pembangunan komunikasi, informatika, persandian dan statistik, baik oleh auditor pemerintah maupun masyarakat;
11. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
  12. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja operasional bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; dan
  13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- b. **Subbagian Keuangan**, mempunyai tugas;
1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
  2. Menyiapkan bahan dan penyusunan anggaran;
  3. Melaksanakan tata usaha keuangan meliputi pembukuan, penyusunan, pertanggungjawaban dan pengamanan dokumen keuangan;
  4. Menyiapkan bahan dan penyusunan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian proses ganti rugi/tuntutan bendahara;
  5. Menyiapkan bahan dan menyusun verifikasi dan pemantauan pelaksanaan anggaran;
  6. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan, pendapatan dan belanja;
  7. Melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung;
  8. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
  9. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran;
  10. Melaksanakan perbendaharaan keuangan anggaran belanja rutin dan pembangunan;
  11. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran/penerimaan;



12. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Subbagian Keuangan;
  13. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- c. **Subbagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas:
1. Melaksanakan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan, kehumasan, administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
  2. Melaksanakan proses penerimaan, pengolahan, distribusi, penggandaan, pengiriman dan pengarsipan, surat-surat masuk maupun keluar;
  3. Mengurus rumah tangga Dinas yang meliputi keamanan, kebersihan, pemeliharaan, perlengkapan/peralatan kantor;
  4. Melaksanakan sirkulasi perlengkapan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemeliharaan dan penghapusan barang;
  5. Menginventarisasi barang inventaris baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
  6. Melaksanakan kegiatan kehumasan, bantuan hukum dan keprotokolan;
  7. Melaksanakan pendokumentasian kegiatan Dinas dan hubungan masyarakat;
  8. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pegawai, formasi dan penunjukan dalam jabatan di lingkungan Dinas;
  9. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
  10. Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, SKP, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
  11. Melaksanakan penyiapan bahan mutasi dan pemberhentian pegawai;



12. Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
13. Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian Dinas dan izin/tugas belajar;
14. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
15. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga dan fungsional;
16. Melakukan penatausahaan, pemnafaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
17. Melakukan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan
18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

### **3. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK**

Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Provinsi, mengelola informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi serta pelayanan informasi publik di Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Provinsi;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi;



- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi;
- f. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah serta pelayanan informasi publik di Provinsi; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengelolaan Informasi Publik membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:

- a. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik
  - b. Seksi Pengolahan Informasi Publik
  - c. Seksi Pelayanan Informasi Publik
- a. **Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik**, mempunyai tugas :
- 1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi;
  - 2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi;
  - 3. Menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial), pengumpulan pendapat umum (survei dan jajak pendapat) dan pengolahan aduan masyarakat di Provinsi; dan
  - 4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- b. **Seksi Pengolahan Informasi Publik**, mempunyai tugas :
- 1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengolahan informasi publik;
  - 2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah di Provinsi;



3. Menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah, pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di Provinsi; dan
  4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- c. **Seksi Pelayanan Media Informasi Publik**, mempunyai tugas :
1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan informasi publik;
  2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik di Provinsi;
  3. Melakukan kemitraan dengan media tradisional, media cetak dan media online;
  4. Menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi publik untuk mengimplementasikan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik dan layanan pengaduan masyarakat di Provinsi; dan
  5. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### **4. BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK**

Bidang Pengelolaan Komunikasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria, dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan mengelola media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;



- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- e. Penyiapan layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi;
- f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik memiliki 3 (tiga) seksi yaitu:

- a. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
  - b. Seksi Layanan Hubungan Media dan Publik;
  - c. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik.
- a. **Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik**, mempunyai tugas :
1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan media komunikasi publik;
  2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi;
  3. Menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Provinsi, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Provinsi/media internal, diseminasi informasi kebijakan



melalui media Pemerintah Provinsi dan Non pemerintah di Provinsi;

4. Melakukan kemitraan dengan media elektronik dan media sosial; dan
  5. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- b. **Seksi Layanan Hubungan Media dan Publik**, mempunyai tugas :
1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang layanan hubungan media dan publik;
  2. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan hubungan media di Provinsi;
  3. Menyelenggarakan layanan pengelolaan hubungan dengan media (media relations), Penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, backgrounders) di Provinsi; dan
  4. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- c. **Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik**, mempunyai tugas :
1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya komunikasi publik;
  2. Pemberiaan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penguatan kapasitas kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi;
  3. Menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik serta pengembangan sumber daya komunikasi publik di Provinsi; dan
  4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.



## **5. BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI, KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN**

Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, memberikan bimbingan teknis dan supervise serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang layanan serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Government dan layanan system komunikasi inta Pemerintah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dasar data center dan persandian, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen publik dan pemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi Provinsi;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelenggaraan dibidang infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, persandian dan layanan



- keamanan informasi e-Government dan layanan system komunikasi intra Pemerintah Provinsi;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan public dan pemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi;
  - e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi; dan
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi,
  - b. Seksi Integrasi dan Keamanan Informasi,
  - c. Seksi Persandian,
- a. **Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi,**
    1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang infrastruktur teknologi informasi;
    2. Memberikan bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi serta layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Provinsi;



3. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC), layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika, Government Cloud Computing, layanan filtering konten negatif, dan layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah; dan
  4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- b. **Seksi Integrasi dan Keamanan Informasi:**
- 1 Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang integrasi data dan keamanan informasi;
  - 2 Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan manajemen data informasi e-Government serta fungsi integrasi layanan publik dan pemerintahan di Provinsi;
  - 3 Menyelenggarakan layanan penetapan standar format data, kebijakan, layanan recovery data dan informasi, layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan, layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Publik, layanan interoperabilitas, layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan, layanan pusat Application Program Interface (API) provinsi;
  - 4 Menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik, layanan penanganan insiden keamanan informasi, layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang persandian dan layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Provinsi, pelaksanaan audit TIK, penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif, layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, layanan bimbingan teknis dalam



pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintah;  
dan

- 5 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. **Seksi Persandian**, mempunyai tugas :

- 1 Merencanakan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan infrastruktur peralatan persandian, proses penyandian (enkripsi dan dekripsi), penggantian/setting, penyimpanan, pengembalian/pemusnahan sistem sandi (kunci sandi), pengamanan aset/fasilitas/instalasi penting vital/kritis, pengamanan sinyal;
- 2 Penyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang persandian;
- 3 Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penguatan kapasitas sumber daya persandian; dan
- 4 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

## **6. BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT**

Bidang layanan e-Government mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Layanan e-Government mempunyai fungsi:



- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi;



- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Layanan e-Government membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. Seksi Pengembangan Aplikasi,
  - b. Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government,
  - c. Seksi Tatakelola e-Government,
- a. **Seksi Pengembangan Aplikasi**, mempunyai tugas :
- (1) Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan aplikasi;
  - (2) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi di Provinsi;
  - (3) Menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik; dan
  - (4) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.



- b. **Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government**, mempunyai tugas:
- (1) Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan ekosistem e-Government;
  - (2) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province serta layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di Provinsi;
  - (3) Menyelenggarakan layanan pengembangan Business Process Re-Engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City), Layanan Sistem Informasi Smart City, layanan interaktif pemerintah dan masyarakat, layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City, layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten/Kota, layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain dan sub domain, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, menetapkan mengubah nama domain dan sub domain, menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain; dan
  - (4) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- c. **Seksi Tatakelola e-Government**, mempunyai tugas :
- (1) Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan tata kelola e-Government;
  - (2) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi



penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) serta pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat di Provinsi;

- (3) Menyelenggarakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government Kabupaten/Kota, layanan koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah, layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK, layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart City, layanan implementasi e-Government dan Smart City, promosi pemanfaatan layanan Smart City;
- (4) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

## **7. BIDANG STATISTIK**

Bidang Statistik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang statistik di lingkup Pemerintah Provinsi, mengelola data dan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Statistik mempunyai fungsi :

- (a) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka evaluasi data dan informasi;
- (b) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi;
- (c) Pelaksanaan penyusunan informasi;
- (d) Pelaksanaan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta sistem dan pelaporan evaluasi kinerja pembangunan;



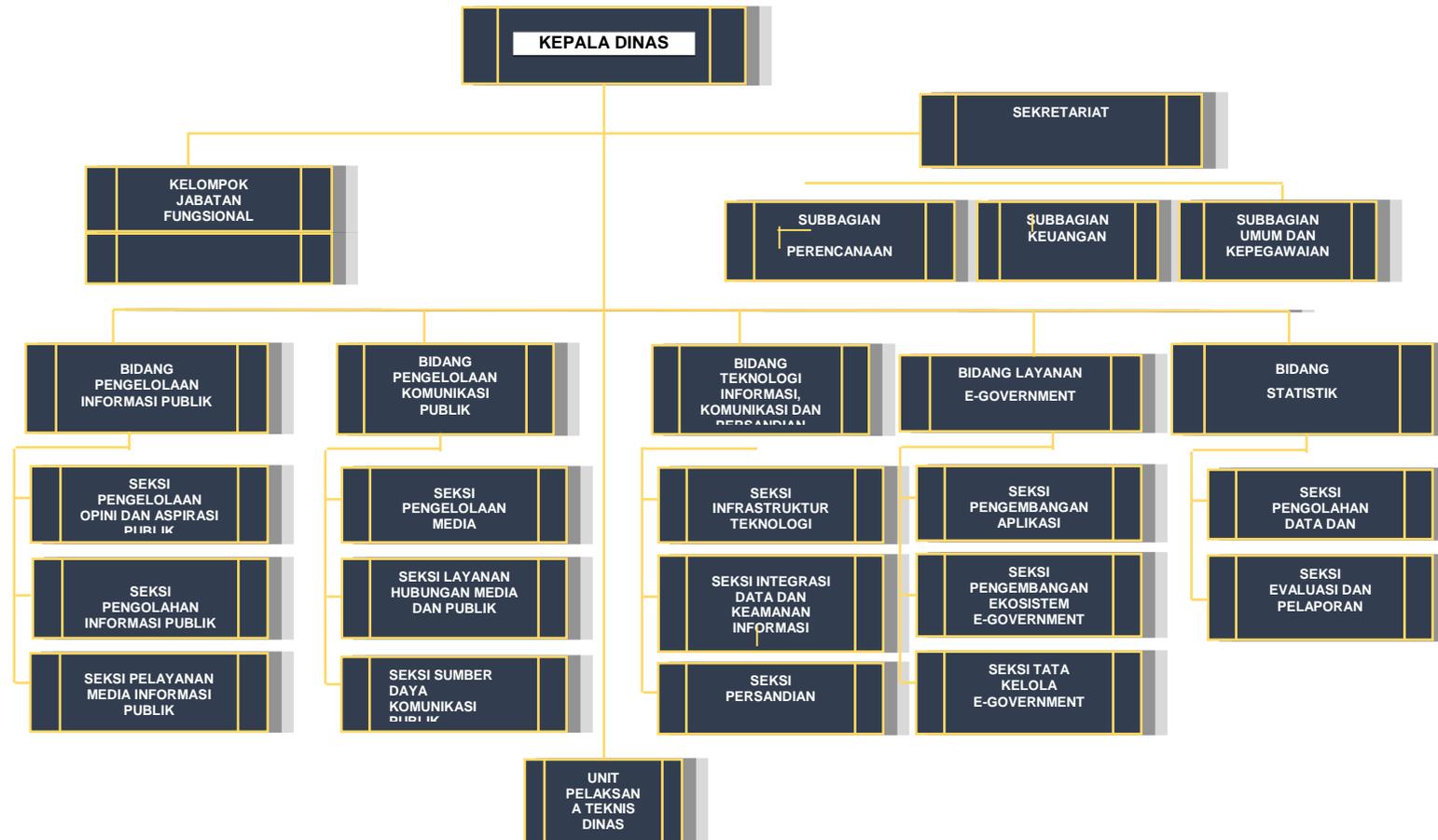
- (e) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dan kinerja pembangunan sektoral;
- (f) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penilaian pelaksanaan pengolahan data dan informasi;
- (g) Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional di lingkungan pemerintahan daerah;
- (h) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Statistik membawahi 2 (dua) seksi yaitu :

- a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

- a. **Seksi Pengolahan Data dan Informasi**, mempunyai tugas :
  - (1) Menyiapkan bahan verifikasi, pemutakhiran, analisis dan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan program kerja Pemerintah Provinsi;
  - (2) Mempersiapkan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan tugas untuk tujuan pelaporan dan bahan rapat koordinasi;
  - (3) Menyiapkan bahan penyusunan dan memelihara statistik hasil-hasil pembangunan daerah; dan
  - (4) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- b. **Seksi Evaluasi dan Pelaporan**, mempunyai tugas :
  - (1) Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  - (2) Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam evaluasi dan pelaporan program kerja;
  - (3) Menyiapkan bahan penyusunan, fasilitasi evaluasi dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan program kerja;
  - (4) Menyiapkan bahan analisis hasil pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja; dan
  - (5) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan**



Sumber : Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.



## 2.2. Sumber Daya Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Susunan kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dapat digambarkan dalam tabel-tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-Laki	31
2	Perempuan	27
	<b>Jumlah</b>	<b>58</b>

**Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Doktoral (S3)	Laki-Laki	-
		Perempuan	-
2	Pasca Sarjana (S2)	Laki-Laki	11
		Perempuan	9
3	Sarjana (S1)	Laki-Laki	11
		Perempuan	14
4	Diploma	Laki-Laki	2
		Perempuan	1
5	SLTA	Laki-Laki	7
		Perempuan	3
6	SLTP	Laki-Laki	-
		Perempuan	-
7	SD	Laki-Laki	-
		Perempuan	-
	<b>Jumlah</b>		<b>58</b>



**Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural**

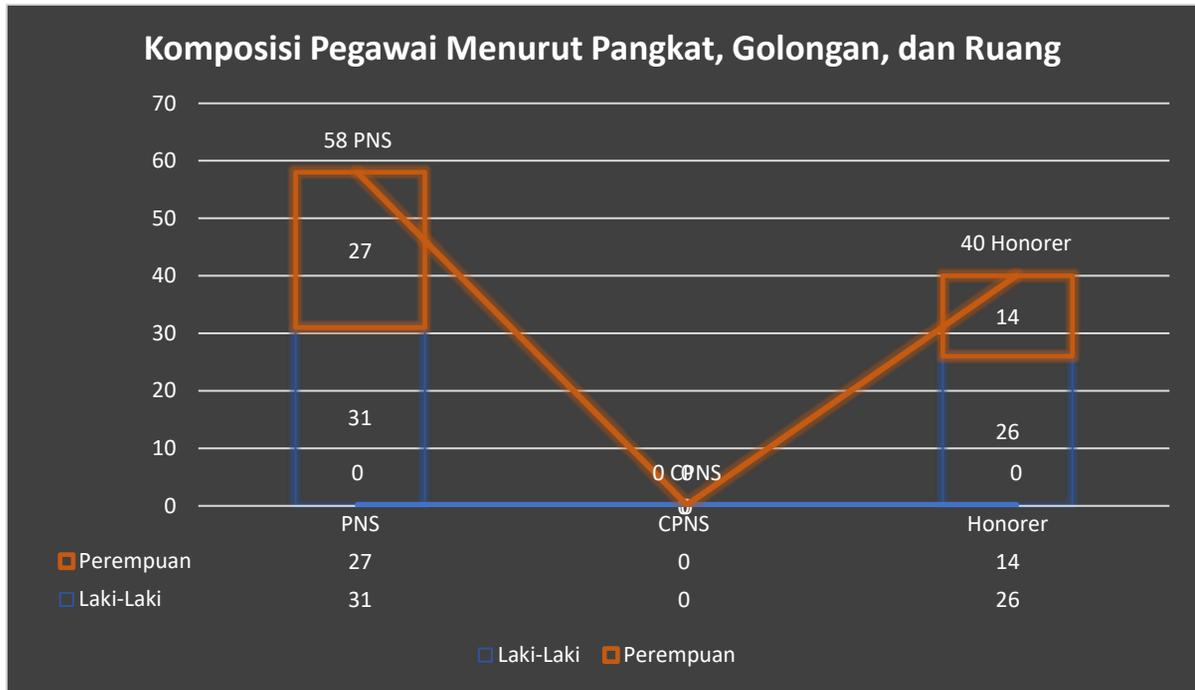
No	Jenis Diklat	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	DIKLATPIM IV / ADUMLA	Laki-Laki	4
		Perempuan	6
3	DIKLATPIM III/ SPAMA	Laki-Laki	6
		Perempuan	6
4	DIKLATPIM II / SPAMEN	Laki-Laki	1
		Perempuan	-
5	DIKLATPIM I / SPATI	Laki-Laki	-
		Perempuan	-
<b>Jumlah</b>			<b>23</b>

**Tabel 2.4 Komposisi Pegawai Menurut Pangkat, Golongan, dan Ruang**

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Pembina Utama Madya / IV.d	Laki-Laki	-
		Perempuan	-
2	Pembina Utama / IV.c	Laki-Laki	-
		Perempuan	-
3	Pembina Tingkat I /IV.b	Laki-Laki	2
		Perempuan	-
4	Pembina / IV.a	Laki-Laki	7
		Perempuan	8
5	Penata Tingkat I /III.d	Laki-Laki	2
		Perempuan	5
6	Penata / III.c	Laki-Laki	6
		Perempuan	7
7	Penata Muda Tingkat I / III.b	Laki-Laki	10
		Perempuan	5
8	Penata Muda / III.a	Laki-Laki	2
		Perempuan	1
9	Pengatur Tingkat I / II.d	Laki-Laki	-



		Perempuan	-
10	Pengatur / II.c	Laki-Laki	-
		Perempuan	-
11	Pengatur Muda Tingkat I / II.b	Laki-Laki	1
		Perempuan	1
12	Pengatur Muda / II.a	Laki-Laki	1
		Perempuan	-
13	Juru Tingkat I / I.d	Laki-Laki	-
		Perempuan	-
14	Juru / I.c	Laki-Laki	-
		Perempuan	-
15	Juru Muda Tingkat I / I.b	Laki-Laki	-
		Perempuan	-
16	Juru Muda / I.a	Laki-Laki	-
		Perempuan	-
17	Tenaga Tidak Tetap (Honorar)	Laki-Laki	26
		Perempuan	14
<b>Jumlah</b>			<b>98</b>



**Tabel 2.5 Sumber Daya Manusia diperbantukan di KIP dan KPID**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Komisi Informasi Prov. Sumsel	3
2	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah prov. Sumsel	5
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>

**Tabel 2.6 Data Pegawai yang akan Pensiun 5 Tahun Kedepan**

No	GOLONGAN	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-	-	-	-
2	Golongan II	-	-	-	-	-	-
3	Golongan III	1	1	1	-	2	5
4	Golongan IV	1	2	2	3	3	11
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>16</b>



**Tabel 2.7 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kebutuhan (Analisis Jabatan)**

URAIAN JABATAN (SELURUH PEMANGKU JABATAN)				
1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN			
2	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN			
NO	JABATAN	GOL	Kebutuhan	Jumlah (orang)
1	<b>Kepala Dinas</b>	IV/d	1	1
			<b>0</b>	
<b>SEKRETARIAT</b>				
2	<b>Sekretaris</b>			
3	<b>Kasubbag Umum dan Kepegawaian</b>	III/d	1	
4	Analisis Jabatan		1	
5	Analisis Pengembangan Karir		1	
6	Pengelola Pemanfaatan BMD	III/b	1	
7	Pengadministrasi Umum		1	
8	Pengadministrasi Kepegawaian		1	
9	Pranata Kearsipan		1	
10	Pengemudi		1	
11	<b>Kasubbag Keuangan</b>	IV/a	1	
12	Bendahara	III/c	1	
13	Verifikator Keuangan	III/c	1	
14	Pengolah Daftar Gaji	III/a	1	
15	Penata Laporan Keuangan		0	
16	Pengadministrasi Keuangan		0	
17	<b>Kasubbag Perencanaan</b>	IV/a	1	
18	Analisis Perencanaan	III/b	1	
19	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran		0	
20	Pengadministrasi Perencanaan dan Program		0	
			<b>8</b>	
<b>BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK</b>				



21	<b>Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik</b>	IV/a	1	
22	<b>Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik</b>	III/d	1	
23	Analisis Publikasi	III/c	1	
24	Penyusun Bahan Informasi	III/c	1	
25	Pengelola Situs/Web		0	
26	<b>Kepala Seksi Pengolahan Informasi Publik</b>	III/d	1	
27	Analisis Berkas Sengketa	IV/a	1	
28	Pengelola Data Hubungan Masyarakat		0	
29	Pengadministrasian Analisis dan Kemitraan Media	IV/a	1	
30	<b>Kepala Seksi Pelayanan Media Informasi Publik</b>	III/c	1	
31	Penyusun Bahan Publikasi	IV/a	1	
32	Pengelola Dokumentasi	III/c	1	
			<b>10</b>	
<b>BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>				
33	<b>Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik</b>	IV/a	1	
34	<b>Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik</b>	III/d	1	
35	Analisis Konten Media Sosial	IV/a	1	
36	Analisis Pelayanan	III/a	2	
37	Pengadministrasian Umu			
38	<b>Kepala Seksi Layanan Hubungan Media dan Publik</b>	III/b	1	
39	Analisis Konten Media Sosial		0	
40	Pengolah Data Penyuluh dan Layanan Informasi	III/a	1	
41	Juru Informasi dan Komunikasi		0	
42	<b>Kepala Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik</b>	III/d	1	
43	Analisis Publikasi	III/d	1	



44	Pengelola Program dan Kegiatan	IV/a III/a	2	
45	Pengolah Data Penyuluhan & Layanan Informasi		0	
			<b>11</b>	
	<b>BIDANG TIK DAN PERSANDIAN</b>			
46	<b>Kepala Bidang TIK dan Persandian</b>	IV/b	1	
47	<b>Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>	III/b	1	
48	Pemeriksa Teknologi Informasi	III/d	1	
49	Pengelola Database dan Jaringan		0	
50	Pengendali Jaringan Komunikasi	II/b	1	
51	Teknisi Jaringan Instalasi		0	
52	<b>Kepala Seksi Integrasi Data dan Keamanan Informasi</b>		0	
53	Pengelola Database	III/d	1	
54	Pengelola Keamanan Sistem Informasi		0	
55	Pengadministrasi Umum	III/c	1	
56	<b>Kepala Seksi Persandian</b>	III/b	1	
57	Operator Transmisi Sandi	III/c III/b, III/b	3	
58	Pengadministrasi Umum	III/b II/a	2	
			<b>12</b>	
	<b>BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT</b>			
59	<b>Kepala Bidang Layanan E-Government</b>	IV/a	1	
60	<b>Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi</b>	IV/a	1	
61	Analisis Sistem Informasi	III/c, III/b	2	
62	Pengelola Database	IV/a	1	
63	<b>Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government</b>	III/c	1	
64	Pengelola Database		0	
65	Pengolah Data	III/c	1	
66	<b>Kepala Seksi Tata Kelola E-Government</b>	IV/a	1	

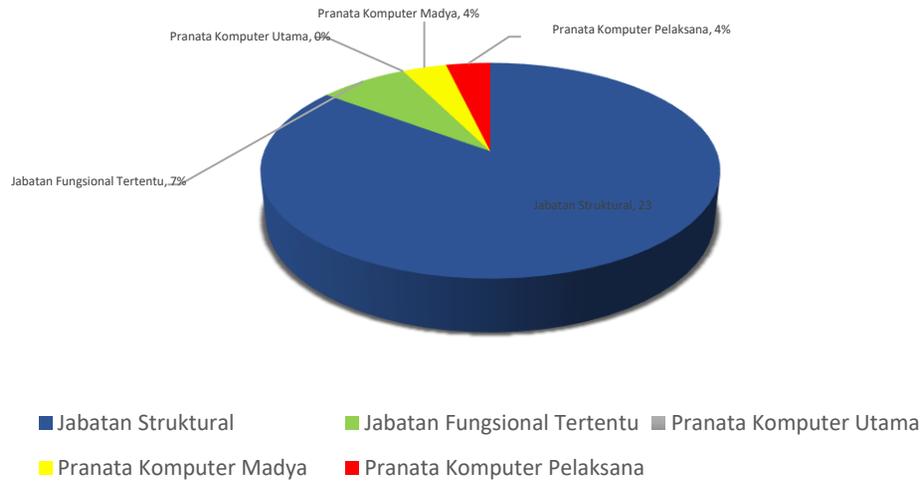


67	Pengelola Database	III/c	1	
68	Pengolah Data	III/b	1	
			<b>10</b>	
<b>BIDANG STATISTIK</b>				
69	<b>Kepala Bidang Statistik</b>	IV/b	1	
70	<b>Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi</b>	IV/a	1	
71	Pengelola Data Statistik	III/c	1	
72	Pengolah Data	III/b	1	
73	Pengadministrasi Umum	II/a	1	
74	<b>Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan</b>	III/b	1	
75	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	III/c	1	
76	Pengolah Data	III/b	1	
			<b>8</b>	
<b>JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU</b>				
77	Pranata Komputer Utama		0	
78	Pranata Komputer Madya	III/d	1	
79	Pranata Komputer Muda		0	
80	Pranata Komputer Pertama		0	
81	Pranata Komputer Penyelia		0	
82	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan		0	
83	Pranata Komputer Pelaksana		1	
84	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	III/a	0	
			<b>2</b>	
85	Sandiman Madya		0	
86	Sandiman Muda		0	
87	Sandiman Pertama		0	
88	Sandiman Penyelia		0	
89	Sandiman Pelaksana Lanjutan		0	
90	Sandiman Pelaksana		0	
			<b>0</b>	
<b>TOTAL JUMLAH</b>			<b>61</b>	

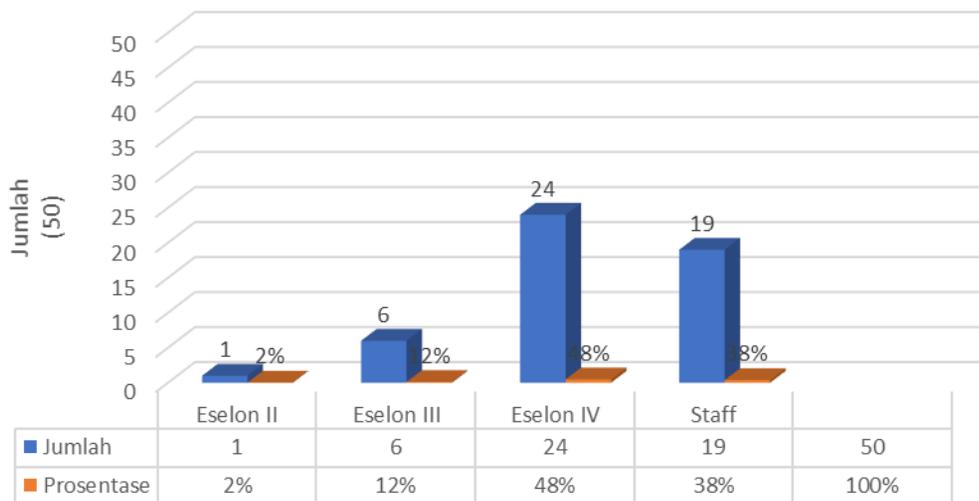
Sumber: Anjab Dinas Komunikasi dan Informatika, tahun 2018



### Komposisi Pegawai Berdasarkan Kebutuhan (Analisis Jabatan)



### Komposisi Eselon PNS dalam grafik





## 2.2.2 Aset

Tabel 2.8

### Daftar Aset Tetap Diskominfo Prov. Sumsel

NO	ASET TETAP	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
<b>TANAH</b>				
1	Lahan bangunan kantor	-	Bidang	a.n BPKAD
<b>PERALATAN dan MESIN</b>				
2	<b>Alat-alat Mesin</b>			
	Mesin Genset	1	Set	
	Mesin Pompa Air	1	Set	
3	<b>Alat-alat Angkutan</b>			
	Kendaraan roda 4 (Empat)	21	Unit	Mobil dinas, operasional kantor
	Kendaraan roda 2 (Dua)	5	Unit	Motor, Sekuter
4	<b>Peralatan Kantor dan Rumah Tangga</b>			
	Peralatan Komputer	22	Buah/Unit	Unit PC
	Notebook, Laptop	15	Buah/Unit	
	Peralatan pendingin	44	Buah/Unit	Unit AC, kulkas
	Alat-alat elektronik	22	Buah/Unit	TV/LCD/LED, Finger mesin, Scanner
	Meubeller	413	Buah/Set	Meja, kursi dan lemari, filing kabinet, dll
5	<b>Peralatan Studio dan Komunikasi</b>			
	Handycam	1	Buah	
	Kamera	2	Buah/Unit	
	Telepon dan Fax	2	Buah	
	Wireless	7	Buah	
<b>KONTRUKSI dan BANGUNAN</b>				
6	<b>Bangunan Gedung</b>			
	Perkantoran	1	Buah/Unit	Dinas



	Command Center	1	Buah/Unit	Layanan
	Data Center	1	Buah/Unit	Server
<b>JALAN, IRIGASI dan JARINGAN</b>				
<b>7</b>	<b>Internet akses</b>	3	Set/Unit	
<b>ASET TETAP Lainnya</b>				
<b>8</b>	<b>Buku, Perpustakaan:</b>			
	Buku peraturan dan perundang-undangan		Buah	Bahan bacaan

Sumber: Aplikasi BMD (Barang Milik Daerah) berdasarkan inventarisir Tahun Anggaran 2018

### 2.3. Kinerja Pelayanan Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dibentuk pada tahun 2016 melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebelumnya tugas dan fungsi yang berkenaan dengan Komunikasi dan Informatika melekat pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik menyelenggarakan tiga urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi kewenangan berdasarkan UU no. 23 tahun 2008, yakni:

1. Urusan Komunikasi dan Informatika dengan sub urusan yang menjadi kewenangan daerah:
  - a. Pengelolaan Informasi Publik
  - b. Penerapan Layanan e-Government
  - c. Pengelolaan Domain dan sub domain di Pemerintah Provinsi
2. Urusan Persandian dengan sub urusan menjadi kewenangan daerah, yakni:
  - a. Persandian untuk pengamanan Informasi daerah Provinsi
3. Urusan Statistik dengan sub urusan kewenangan daerah yakni:
  - a. Pengelolaan statistik sektoral

Adapun kinerja pelayanan berkenaan Urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2017 - 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.9**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfo Prov. Sumsel**  
**Urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik**

NO	Indikator Kinerja Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Rata-Rata kecepatan akses internet kepada OPD	100%			-	-	-	100%	100%	-	-	-	83,33%	94,5%	-	-	-	83,33%	94,5%
2.	Jumlah informasi penting yang diamankan pada OPD	100%			-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	96,67%	-	-	-	100%	96,67%
3.	Jumlah Layanan e-Government kepada OPD dan publik	100%			-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
4.	Jumlah aplikasi yang terintegrasi pada OPD dan Publik	100%			-	-	-	100%	100%	-	-	-	97,92%	100%	-	-	-	97,92%	100%
5.	Jumlah diseminasi informasi hasil pembangunan pada masyarakat melalui media tradisional, cetak, dan online	100%			-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
6.	Jumlah Komunikasi melalui media sosial dan media publik	100%			-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
7.	Jumlah OPD dan Stakeholder yang memanfaatkan data statistik Sektoral	100%			-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
8.	Persentase Data statistik Sektoral yang tersedia tepat waktu	100%			-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%

**Tabel 2.10**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Diskominfo Prov. Sumsel**  
**Urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik**

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	2.563.649.000	3.306.500.000	-	-	-	2.463.446.503	2.871.543.721	-	-	-	90,95 %	91,03 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	311.000.000	764.287.275	-	-	-	299.089.000	718.531.440	-	-	-	72,68 %	95,02 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	80.000.000	150.000.000	-	-	-	78.647.796	136.542.700	-	-	-	98,31 %	91,03 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	100.000.000	100.000.000	-	-	-	96.894.020	81.995.050	-	-	-	96,89 %	82,00 %
Program Kejasama Informasi dan Media Massa	-	-	-	4.656.280.000	-	-	-	-	4.647.985.909	-	-	-	-	99,63 %	-
Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	-	-	-	60.000.000	-	-	-	-	59.377.500	-	-	-	-	98,96 %	-
Program Pengembangan Aplikasi Telekomunikasi	-	-	-	2.350.000.000	-	-	-	-	2.303.291.266	-	-	-	-	95,03 %	-
Program Penguatan Kelembagaan KPID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pengawasan Isi Siaran	-	-	-	1.800.000	-	-	-	-	1.800.000	-	-	-	-	100 %	-
Program Perizinan Isi Siaran	-	-	-	7.728.000	-	-	-	-	7.728.000	-	-	-	-	100 %	-
Program Pengelolaan Informasi Publik dan Media Massa	-	-	-	-	4.960.000.000	-	-	-	-	4.733.886.737	-	-	-	-	91,86 %
Program Pengembangan Komunikasi publik	-	-	-	-	40.000.000	-	-	-	-	28.884.775	-	-	-	-	72,21 %
Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	17.632.000.000	-	-	-	-	15.728.414.443	-	-	-	-	84,47 %
Program Pengembangan Sistem Keamanan Informasi	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	95.961.000	-	-	-	-	95,96 %

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Pengembangan Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	-	-	1.200.000.000	-	-	-	-	1.153.792.764	-	-	-	-	96,41 %
Program Pengembangan Persandian	-	-	-	-	130.000.000	-	-	-	-	128.750.425	-	-	-	-	98,99 %
Program Pengembangan Statistik Sektoral	-	-	-	120.000.000	50.000.000	-	-	-	119.110.162	43.326.000	-	-	-	100 %	86,7 %



Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan meliputi:

#### **A. MEDIA CENTER**

Media center dirancang untuk mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah, dan terjangkau. Keberadaan media center juga merupakan sebuah satuan sinergi yang melekat pada lembaga informasi dan informatika tiap daerah yang membutuhkan.

#### **B. SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS TIK)**

Pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik/ pemerintahan digital (*e-government*) merupakan penerapan sistem proses penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh lembaga-lembaga pemerintah secara nasional yang tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dilingkungan pemerintah;
2. Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan obyektif;
3. Tata Kelola perubahan reformasi birokrasi (manajemen transformasi reformasi birokrasi)
4. Tata Kelola pengetahuan (Manajemen knowledge)
5. Tata Kelola pengendalian resiko (Manajemen Resiko)
6. Peningkatan kualitas mutu pelayanan publik (Manajemen Pelayanan Publik)

#### **C. SURAT MENYURAT ELEKTRONIK (E-OFFICE)**

Dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan administrasi perkantoran yang dilakukan secara elektronik dan menggunakan bantuan alat komunikasi dan sistem informasi;

#### **D. FASILITASI COLOCATION DAN HOSTING**

Merupakan pelayanan teknis kepada OPD Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota dengan menempatkan server dan aplikasinya untuk memperoleh fasilitas akses internet dalam mendukung layanan informasi publik;



#### **E. KEAMANAN INFORMASI**

Untuk mengevaluasi keamanan informasi yang ada di Prov. Sumsel, adapun evaluasi dilakukan terhadap beberapa area target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar SNI ISO/IEC 27001:2009;

#### **F. INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK (DATA CENTER)**

Merupakan layanan untuk fasilitasi keterhubungan antar OPD untuk mengintegrasikan, sistem informasi, pertukaran data dan informasi dalam rangka mengimplementasikan e-goverment dan layanan publik;

#### **G. PERSANDIAN**

Merupakan kegiatan pelayanan, pembinaan, pengawasan, khusus diantaranya Pembinaan dan Pengawasan menara Telekomunikasi, Bimbingan Teknis Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk serta Pemberian Bimbingan Teknik Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO);

#### **H. PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)**

Merupakan upaya untuk memberdayakan lembaga komunikasi sosial yang berbasis kelompok masyarakat dengan tugas untuk mengumpulkan mengolah dan menyebarluaskan informasi khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah sekitarnya;

#### **I. FORUM KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL**

Merupakan salah satu bentuk media tradisional yang komunikatif dalam bentuk kelompok seni pertunjukan rakyat yang mampu menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat;

#### **J. FORUM BAKOHUMAS PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Merupakan kegiatan forum pertemuan untuk menyamakan persepsi program dan kebijakan pemerintah antar-Humas OPD Provinsi dan BUMN/BUMD dengan berbagai stakeholder pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;

#### **K. MEDIA ON-LINE (PENGELOLAAN MEDSOS)**

Merupakan fasilitas akses informasi berbasis TIK untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui situs [www.sumselprov.go.id](http://www.sumselprov.go.id) dan [www.kominfo.sumselprov.go.id](http://www.kominfo.sumselprov.go.id);



#### **L. FASILITASI KOMISI INFORMASI PROVINSI (KIP)**

Merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan adjudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi;

#### **M. HELPDESK PPID DAN SENKETA INFORMASI**

Merupakan jenis pelayanan informasi masyarakat yang berkaitan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Para pemohon informasi akan dilayani oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan (SOP). Layanan permohonan informasi akan dipenuhi sesuai dengan SOP dalam jangka waktu yang sudah ditentukan (7 hari kerja). Apabila permohonan informasi tidak sesuai atau tidak dipenuhi pemohon informasi dapat mengajukan keberatan pengajuan permohonan informasi atau dapat melayangkan surat permohonan informasi kepada Komisi Informasi untuk melakukan media.

#### **N. LAPOR SP4N (LAYANAN PENGADUAN)**

Merupakan jenis layanan informasi publik dalam rangka menampung aspirasi masyarakat dan permasalahan publik dalam bentuk pengaduan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikelola oleh Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan layanan oleh birokrasi untuk pelayanan publik.

#### **O. LAYANAN COMMAND CENTER**

Merupakan sebuah sistem dimana pengawasan suatu wilayah cukup hanya dengan menatap layar komputer dan pengoperasiannya dilakukan oleh ahli-ahli teknologi computer dan untuk mengakses info, user/masyarakat cukup menggunakan komputer atau gadget yang terintegrasi ke internet. Dalam *Command Center* tersebut terdiri dari berbagai aplikasi yang bisa memonitor keadaan wilayah Sumatera Selatan. Di dalamnya ada data cuaca, peta, video feed, special *vehicles*



*location*, video analisis dan sebagainya. Sebagai penunjang akan dipasang CCTV. Rekaman-rekaman CCTV tersebut nantinya akan dianalisis lebih detil sehingga timbul notifikasi sesuai kebutuhan. Fungsi dari Command Center sendiri adalah untuk menyempurnakan pelayanan publik keluar, dan mempermudah pelayanan kedalam yakni manajemen pengambilan keputusan cepat. *Command center* ini, akan menjadi pusat data informasi dari seluruh instansi di lingkungan Pemprov Sumsel.

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sebagai organisasi perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam kewenangan membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait layanan komunikasi dan infomatika untuk mendukung layanan publik pada unit-unit organisasi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat (*business unit*), dengan memberi kewenangan yang lebih luas, fasilitas yang lebih memadai, mempermudah akses pada pengambilan keputusan di tingkat puncak dalam menghadapi tingginya kebutuhan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Keterbukaan informasi publik dalam era globalisasi membutuhkan peningkatan kecepatan, ketepatan layanan dan mutu pelayanan dengan cara mengoptimalkan proses layanan melalui pemanfaatan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi, namun dikarenakan keterbatasan pembangunan infrastruktur masih terfokus pada wilayah perkotaan mengakibatkan sulitnya pemenuhan kebutuhan akan informasi masyarakat pedesaan.

Dengan demikian, sesuai fokus pembangunan nasional dibidang komunikasi dan informatika dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sector* di bidang Komunikasi dan Informatika telah mengambil kebijakan yang dituangkan dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2019-2023 yang berfokus kepada “Pemerataan Infrastruktur dan Konektivitas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan untuk mewujudkan



fokus pembangunan pemerintah pusat yang juga telah menjadi fokus Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan adalah :

### **TANTANGAN**

1. Globalisasi informasi dan revolusi industri 4.0 berdampak pada keterbukaan informasi public (Good governance);
2. Pesatnya perkembangan dan penetrasi TIK di wilayah Sumsel; (inklusi digital);
3. Mendorong masyarakat Sumatera Selatan menjadi masyarakat digital (kelompok masyarakat yang berpartisipasi dan berinteraksi terhadap birokrasi secara digital);
4. Menjembatani kesenjangan antar OPD dalam memberikan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik (*e-Gov*); (transformasi digital);
5. Pemanfaatan Teknologi dan Komunikasi di wilayah Perdesaan (prioritas Nasional);
6. Peran TIK dalam mewujudkan ekosistem TIK (*Smart Province*);
7. Penyajian data statistik sektoral yang akurat dan akuntabel melalui analisis data sektoral (Pusat wali data/informasi sektoral);
8. Peningkatan Mutu pelayanan publik Pemerintah Provinsi (tata kelola pelayanan publik).

### **PELUANG**

1. Pemanfaatan perkembangan dan penetrasi TIK untuk penyebaran informasi dan penciptaan kontribusi TIK bagi pendapatan daerah;
2. Pemerataan pemanfaatan TIK pada daerah-daerah yang masih belum tersentuh akses layanan TIK;
3. Kebutuhan Integrasi *Smart City* menuju proses *Smart Province* yang mengedepankan penggunaan TIK;
4. Adanya event nasional dan internasional yang membuka peran TIK dalam penyelenggaraanya;



5. Adanya bermacam aplikasi pelayanan *e-Government* yang dapat dikembangkan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan kemudahan layanan dan informasi;
6. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan;
7. Arah kebijakan Nasional untuk mendorong pengembangan TIK terkait :
  - a. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - b. Utilitas dan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - c. Pendukung Infrastruktur, Utilitas dan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi.

**Tabel 2.11**  
**Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Kominfo prov. Sumsel dengan Renstra K/L**

NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN PADA RENSTRA OPD PROVINSI	SASARAN PADA RENSTRA K/L
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rata- Rata kecepatan layanan	Meningkatnya pendayagunaan sarana dan prasarana TIK dalam mendukung pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Kesenjangan Digital (digital divide)</li> <li>❖ Keamanan Informasi</li> <li>❖ E-government</li> <li>❖ Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>❖ Digitalisasi data/informasi</li> </ul>
2.	Jumlah sistem informasi penting yang diamankan pada OPD	Meningkatnya Pelayanan e-government dalam penerapan Teknologi dan Sistem Informasi pada pelayanan publik	
3.	Jumlah aplikasi yang terintegrasi pada OPD dan Publik		
4.	Indeks keterbukaan informasi publik	Meningkatnya penyebarluasan (diseminasi) informasi dan komunikasi publik dalam keterbukaan informasi	
5.	Jumlah Dokumen Data Statistik Sektoral yang dihasilkan	Meningkatnya Kualitas Layanan Data Statistik Sektoral Provinsi Sumsel	



**Revisi Tabel 2.11  
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Kominfo prov. Sumsel dengan  
Renstra K/L**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SASARAN PADA RENSTRA OPD PROVINSI</b>	<b>SASARAN PADA RENSTRA K/L</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Terwujudnya Keterbukaan Informasi Dan Komunikasi Publik Badan Publik Tingkat Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Kesenjangan Digital (digital divide)</li> <li>❖ Keamanan Informasi</li> <li>❖ E-government</li> <li>❖ Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>❖ Digitalisasi data/informasi</li> </ul>
2.	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Informasi dan Komunikasi Masyarakat/Publik		
3.	Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya Data / Informasi Teknologi Komunikasi Milik Daerah Yang Handal/Baik (Sumsel Satu Data)	
4.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		
5.	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah		
6.	Persentase Akses Internet	Terwujudnya Kepemerintahan Berbasis Tik (Teknologi Informasi Dan Komunikasi) Provinsi Sumatera Selatan	
7.	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi		
8.	Persentase Layanan Pengguna E-Government		



## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yaitu dalam Bidang Komunikasi dan Informatika, serta bidang Persandian dan Statistik, sehingga dalam melaksanakan kewenangannya Diskominfo Prov. Sumsel menitik beratkan pada penyebaran informasi ke seluruh wilayah Sumatera Selatan dengan mempedomani  **misi 4 (empat) RPJMD (Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2023, “Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah”** , dalam hal ini Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Pemerintah atau lazim disebut e-Government diharapkan akan membuat masyarakat dan pemerintah mampu berkomunikasi lebih baik, murah, dan efektif, dalam konteks pelayanan publik. Kualitas pelayanan pemerintah akan meningkat (Vassilakis, 2004), partisipasi warga meningkat (Lytras, 2006), kepercayaan masyarakat meningkat (Abie, 2004), dan akuntabilitas birokrasi lebih baik (Eyob, 2004; Gonzalez, 2007; Holzer, 2004) serta transparan (Eyob, 2004; Iyer, 2006; Tran, 2004; Wescott, 2005). Lebih dari itu proses pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah akan lebih tepat, akurat, dan aman (Holden, S.H., dan Millett, L.I., 2005). sehingga, penggunaan e-Government merubah perilaku aparat dan masyarakat dalam pengelolaan urusan publik menjadi lebih baik. Terkait dengan pelaksanaan kewenangannya terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:



## IDENTIFIKASI

1. Minimnya data/informasi kebijakan bagi layanan Informasi publik; (penyediaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah);
2. Terbatasnya infrastruktur aksesibilitas informasi dan sumber daya TIK;
3. Belum optimalnya penerapan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);
4. Layanan manajemen data/informasi elektronik pemerintah daerah (data/informasi statistik sektoral/**Sumsel Satu Data**) ;
5. Belum optimalnya pelayanan publik melalui layanan secara elektronik;
6. Kurangnya literasi pemanfaatan startup digital oleh para pelaku bisnis/UMKM di Provinsi Sumatera Selatan;
7. Belum optimalnya penerapan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
8. Belum optimal dijalankan kebijakan pemberdayaan PPID pembantu dan partisipasi masyarakat dalam penyampaian informasi;
9. Belum optimalnya implementasi/pelaksanaan keterbukaan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai amanat UU No.14 tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya;
10. Hasil Monitoring dan evaluasi dan inventarisir kementerian dalam negeri terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika Provinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu dua tahun, adanya tugas pokok dan fungsi urusan Komunikasi dan Informatika masih tersebar di berbagai Perangkat Daerah. (kewenangan Dinas belum optimal dijalankan).



**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan Pelayanan Diskominfo Prov. Sumsel**

Aspek Kajian	Capaian/ kondisi Saat ini	Standar yang dipakai	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenanga)	Eksternal (Bukan Kewenangan )	
1	2	3	4	5	6
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis ElektronikTingkat kepuasan penyelenggaraa n pemerintah	Tahap rintisan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inpres No. 3 Tahun 2003.</li> <li>• Pergub Sumsel Nomor 47 tahun 2017</li> <li>• Permenpan no. 95 tahun 2018</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum memiliki SPM dan SOP dalam urusan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> </ul>
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Keamanan Siber	Pengamanan Informasi belum optimal  Pengamanan Fisik ruang pimpinan  Sudah tersedia Jaringan Senopati  Monitoring dan Evaluasi yang terlaksana  Lebih meningkatkan pengamanan informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepmendagri nomor 34 Tahun 2001 ttg Pengamanan Berita Rahasia melalui proses persandian dan telekomunikasi.</li> <li>- Perka Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan KAK Tata kelola Keamanan Informasi</li> <li>• Penyusunan rencana literasi digital pengamanan informasi</li> <li>• Diklat Sandi , Diklat Teknis, Diklat IT security / Siber.</li> <li>• Pengajuan bantuan palsan/ Aplikasi dan APU ke Lemsaneg</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum memiliki KAK dalam tata kelola pengamanan informasi sebagai dasar pengelolaan, operasional, dan evaluasi keamanan informasi</li> <li>• Kurangnya tingkat kesadaran User tentang keamanan informasi .</li> <li>• Pelaksanaan pengamanan informasi belum sesuai dengan standar ISO 270001 operasional</li> <li>• Keterbatasan jumlah Sandiman yang ada belum memenuhi kebutuhan Operasional Persandian</li> <li>• Palsan/ Aplikasi dan APU yang tersedia belum memenuhi kebutuhan untuk Pengotimalan fungsi Persandian.</li> </ul>



Tingkat Kepuasan Masyarakat	Tersedianya layanan Sistem Informasi pemerintahan terpadu  Pelaksanaan survey mempedomani pergub	Pergub 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Pergub No 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kominfo Sumsel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Masterplan Pengembangan Smart Province City</li> <li>• Penyusunan draf SK gubernur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum tersedianya Masterplan Smart Province;</li> <li>• Belum tersedianya SPM dan SOP bidang pelayanan e_Gov dalam lingkup Smart Province;</li> <li>• Belum adanya layanan Business process re-Engineering yang dapat memfasilitasi kepentingan Pemerintah dengan swasta dalam Smart Province dan Smart City.</li> </ul>
Penguatan Indeks Keterbukaan Informasi berbasis elektronik	Adanya layanan interaktif antara pemerintah dan masyarakat melalui LAPOR SP4N		Pembentukan Sistem Aplikasi e-Interaksi		Belum adanya sub domain aplikasi e-Interaksi
	Persetujuan, pengaturan pemberian layanan penggunaan domain go.id	Permen Kominfo Nomor 28 tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk semua situs resmi penyelenggara negara baik pusat maupun daerah			Masih banyak instansi pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota yang belum menggunakan nama domain go.id
Penguatan Infrastruktur TIK (Peningkatan Konektifitas)	Bandwith yang disediakan 300 MBps /tahun	Bahwa Diskominfo di Indonesia umumnya telah memiliki kapasitas bandwith 500 MBps	Dari pendanaan yang ada, Kominfo baru mampu menyiapkan 300 MBps/tahun		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan aplikasi pelayanan tidak maksimal, jika dilakukan secara bersamaan.</li> <li>• Besarnya kebutuhan TIK hingga 300 MBps, beberapa aplikasi baru belum dapat dijalankan secara maksimal.</li> </ul>
	1 Data Center		Manajemen pengembangan dan perawatan server data		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum memiliki gedung/ruang khusus data warehouse</li> <li>• Kurangnya penyimpanan database</li> </ul>



	Lokasi Pengelolaan Server dan data center Pemprov Sumsel di Kantor Kominfo A. Rivai	Pergub No 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kominfo Sumsel	Manajemen pengendalian, perbaikan, perawatan dan perlindungan		<ul style="list-style-type: none"><li>• Setiap Sistem Informasi pada tiap server masih terpisah-pisah sehingga manajemen pengelolaan belum baik.</li></ul>
penerapan sistem perencanaan berbasis informasi (e-planning)	Ada 53 aplikasi dan sub domain, dan 74 situs milik OPD lingkup Pemprov Sumsel	Pergub no 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kominfo Sumsel	<ul style="list-style-type: none"><li>• penyusunan Pergub/untu k dijadikan sebagai payung hukum dalam menata aplikasi yang telah ada</li></ul>	-	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum memiliki SPM/SOP sebagai dasar pengelolaan aplikasi dan situs milik OPD dan SPM SOP sebagai dasar kebijakan pengembangan aplikasi</li><li>• Hampir seluruh OPD Provinsi sudah memiliki akun website dan sub domain aplikasi, namun masih tersebar dan belum termanfaatkan secara optimal dan belum terintegrasi pada server Data Center Pemprov. Sumsel.</li></ul>
	Pengolahan data dan Informasi, Evaluasi dan Pelaporan	UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik; PP No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Produk statistik sektoral</li><li>• Produk statistik bidang Kominfo</li><li>• Produk hasil monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan Kominfo</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum optimalnya SDM Statistik Kominfo untuk menghasilkan produk statistik sektoral.</li></ul>



**Tabel 3.2**  
**Identifikasi Isu – Isu Strategis**

No.	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Revolusi Industri 4,0 /IoT (Cloud Computing dalam Sistem Teknologi Informasi)	Menuju era digitalisasi broadband dari sistem analog	Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Sumsel masih belum optimal	
2		Keterbukaan Informasi Publik	Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi	
3		Masalah Keamanan informasi dan siber	Pemberdayaan dan Peran aktif dalam pengelolaan data/informasi	

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2023**

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam melaksanakan tupoksinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan mengacu kepada Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel yang ditetapkan dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023. Berikut telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel tahun 2019 - 2023.

#### **3.2.1 Visi**

Dengan mempertimbangkan kinerja pembangunan yang telah dicapai pada periode 2013 - 2018 dan memperhatikan hasil analisis isu strategis maka visi pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2023 ditetapkan sebagai berikut :

**“SUMATERA SELATAN MAJU UNTUK SEMUA.”**



Penjelasan visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan 2019 - 2023 sebagai berikut :

**Sumsel Maju Untuk Semua** adalah keadaan dimana terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan dan pembangunan maritim yang merata dan berkeadilan, dimana hasil - hasil pembangunannya dinikmati seluruh anggota masyarakat.

**Sumsel Maju Untuk Semua** adalah kondisi dimana meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas, dan kearifan lokal disamping terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan dukungan anggaran pro-rakyat, pro-lingkungan, dan pro-gender yang transparan dan akuntabel.

**Sumsel Maju Untuk Semua** adalah kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat orang banyak.

**Sumsel Maju Untuk Semua** adalah terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat sehingga anggota masyarakat dapat menjalankan aktivitas keagamaan, terciptanya kehidupan masyarakat yang menghargai perbedaan, dan masyarakat yang dapat menikmati kesenian bermutu di pusat-pusat kebudayaan.

### 3.2.2. Misi

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber daya manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.



3. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang di dukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.
4. Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saling daerah dengan memperitmbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.
5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pada pariwisata religius.

**Misi 1:** Membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan, **program kerjanya yaitu :**

1. Pengembangan ekonomi kreatif di sektor jasa dan industry kecil/menengah.
2. Pengembangan kawasan komoditas/sector unggulan berbasis potensi sumber daya lokal.
3. Membangun infrastruktur dalam mempercepat pembangunan perekonomian rakyat.
4. Memfasilitasi pembangunan industri sektor hilir dari potensi ekonomi masyarakat.
5. Penyediaan data dan informasi perekonomian secara komperehensif, real time dan online.
6. Membentuk bank data potensi dan perkembangan ekonomi Sumatera Selatan secara online.
7. Mengembangkan industri pengolahan (manufaktur) dengan memprioritaskan pengguna sebesar-besarnya tenaga kerja lokal dan pemanfaatn sumber daya alam (resources)/bahan baku lokal.



8. Penataan pola hubungan ekonomi antar investor di sektor mengedepankan pendekatan dialogis dan partisipatif.

**Misi 2 :** Meningkatkan Kualitas Sumber daya manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas, **program kerjanya yaitu :**

1. Menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas melalui revilitasi saran dan tenaga kesehatan (Puskesmas, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa, Posyandu, Pos KB, Tanaman Obat Keluarga, Gerakan Sadar Gizi, Perilaku Hidup Sehat).
2. Memfasilitasi Dokter Keluarga Mandiri.
3. Membangun Perilaku Masyarakat Hidup Sehat Secara Partisipatif
4. Pembentukan Program kesehatan kewilayahan (Desa/Kelurahan Sehat, Kecamatan Sehat).
5. Menjamin akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas yang murah mulai tingkat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).Taman Kanak-Kanak, SMP/Madrasah,SMU/Aliyah.
6. Memfasilitasi pembentukan PAUD di setiap desa di Sumatera selatan sebagai sarana pendidikan untuk memberdayakan generasi emas sebagai upaya membangun SDM yang unggul.
7. Revitalisasi lembaga-lembaga pendidikan yang terfokus pada potensi lokal.
8. Pembentukan lembaga-lembaga keterampilan /pelatihan yang terfokus pada pengembangan potensi lokal.
9. Menjamin akses masyarakat terhadap peningkatan keterampilan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
10. Mengefektifkan keterlibatan lembaga pendidikan berbasis keagamaan untuk pengembangan potensi lokal.
11. Mendorong program-program kepemudaan yang kreatif dan inovatif di berbagai bidang.
12. Pengembangan dan memberikan penghargaan terhadap capaian presentasi pemuda bidang seni, olahraga, budaya, dan akademis.



**Misi 3 :** Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang di dukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsive, **Program kerjanya yaitu :**

1. Membangun hubungan administrasi pemerintahan yang lebih harmonis dengan Bupati/Walikota se-Sumsel sebagai bagian dari proses reformasi birokrasi.
2. Mendorong pengutamaan kepentingan publik oleh pelayanan public dengan pelayanan birokrasi yang berbasis teknologi informasi.
3. Revitalisasi infrastruktur pelayanan publik, baik secara manual maupun online.
4. Membangun jaringan interkoneksi layanan publik yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, yang bisa di akses oleh public secara online 24 jam/hari, 7 hari/minggu.
5. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan di semua bidang.
6. Menciptakan pelayanan publik secara terpadu, cepat dan mudah.
7. Melibatkan unsur LSM/Ormas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh lembaga pemerintahan.
8. Mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintahan dalam rangkahan pencegahan terhadap tindak korupsi dan tindakan penyelewengan guna menciptakan pemerintahan yang baik (*good government*).
9. Menempatkan posisi semua stakeholder (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bupati dan Walikota) di Sumatera Selatan dalam satu kepentingan pembangunan Sumatera Selatan maju.
10. Memfasilitasi forum kepala daerah se-Sumatera Selatan dengan menjadwalkan pertemuan rutin dalam jangka waktu tertentu.
11. Melakukan kunjungan ke semua daerah secara berkala untuk penerapan aspirasi dan mendorong keunggulan potensi masyarakat.
12. Melibatkan institusi pendidikan tinggi di daerah sebagai *think tank* pembangunan daerah.



13. Menjadikan lembaga pers dan media massa sebagai mitra dalam pembangunan daerah.

**Misi 4** : Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saling daerah dengan memperitmbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah, **Program kerjanya yaitu :**

1. Menciptakan pembangunan Sumatera Selatan yang selaras dengan kondisi kewilayahan yang memiliki infrastruktur yang memadai dan di dukung tersedianya insfrastruktur yang dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah.
2. Memfasilitasi proses eksploitasi, pengolahan, dan distribusi kegiatan pertambangan yang senantiasa berada dalam koridor partisipasi dan kesejateraan masyarakat lokal.
3. Pembangunan industri keenergian kreatif yang berbasiskan batubara di tingkat masyarakat lokal.
4. Mengundangkan peraturan daerah yang menekankan keterlibatan dan pemerintahan daerah setempat.
5. Penigkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan masyarakat daerah agar mampu terlibat dalam kegiatan pertambangan dan energi.
6. Membangun pengembangan sektor sektor energy alternative (air, udara, biofuel, biomass) berbasisikan pada potensi di daerah sumatera Selatan.
7. Pengembangan sistem teknologi baru dalam efektifitas sistem transportasi batubara.
8. Revitalisasi sistem irigrasi yang mendukung sistem pertanian masyarakat.
9. Menjamin kemudahan masyarakat untuk mengakses air bersih.
10. Mempercepat pembangunan insfrastruktur pertambangan batubara.

**Misi 5** : Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya



dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pada pariwisata religious,

**Program kerjanya yaitu :**

1. Mendorong penguatan pengetahuan keagamaan masyarakat agar terbentuk masyarakat madani yang religius.
2. Memfasilitasi tokoh agama dalam meningkatkan pengetahuan keagamaan.
3. Reinventing budaya lokal dan pengetahuan lokal dalam membangun identitas cultural masyarakat.
4. Mendorong memajukan bahasa lokal sebagai kekayaan khas budaya Sumatera Selatan.
5. Mendorong budaya lokal dan pengetahuan lokal dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah sebagai proses pengembangan budaya lokal yang dapat berkontribusi dalam membangun karakter bangsa.
6. Menjamin kebebasan untuk mengembangkan dan mengekspresikan seni budaya masing-masing di daerah Sumatera Selatan.
7. Memfasilitasi semua aktifitas lembaga kebudayaan dan keagamaan untuk berpartisipasi dalam membangun penguat toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
8. Membangun akses ruang-ruang kreatifitas seni dan budaya yang mampu menciptakan ruang publik yang berbudaya di seluruh Sumatera Selatan.
9. Menekankan tingkat kemiskinan guna memperkecil kesenjangan sosial yang dapat melahirkan konflik sosial.

Visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan kedalam kebijakan umum dan sasaran – sasaran utama yang merupakan unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Adapun 16 (enam belas) sasaran dalam program prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

- 1) Maju ekonomi kerakyatan;
- 2) Maju investasi, industri dan perdagangan;
- 3) Maju pertanian rakyat dan kedaulatan pangan;
- 4) Maju kesejahteraan masyarakat;



- 5) Maju akses energi;
- 6) Maju kesehatan masyarakat;
- 7) Maju akses Pendidikan berkualitas;
- 8) Maju pembangunan responsive gender dan perlindungan anak;
- 9) Maju pelayanan publik berkualitas
- 10) Maju pembangunan yang transparan dan akuntabel
- 11) Maju aparatur profesional dan berintegritas;
- 12) Maju kualitas lingkungan hidup
- 13) Maju infrastruktur dan konektivitas;
- 14) Maju stabilitas keamanan, ketertiban dan kehidupan beragama;
- 15) Maju seni, budaya dan pariwisata
- 16) Maju pemuda dan olahraga.

Analisis Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta faktor pendorong dan penghambat terkait dengan Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam penjabarannya secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Diskominfo Prov. Sumsel**  
**Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan Daerah**  
**Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan**  
**Tahun 2019-2023**

**“SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA”**

NO	PROGRAM TERKAIT RKPD	ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 1 :				
Membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan				
Program Kerja :				
-				
Sasaran :				
-				
-	-	-	-	-
Misi 2 :				
Meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran dan integritas				



Program Kerja :				
Menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas melalui revilitasi saran dan tenaga kesehatan (Puskesmas, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa, Posyandu, Pos KB, Tanaman Obat Keluarga, Gerakan Sadar Gizi, Perilaku Hidup Sehat).				
Sasaran :				
Maju pembangunan responsive gender dan perlindungan anak				
1	-	<b>Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	Kurangnya layanan komunikasi stunting	Penyediaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pengembangan Akses TIK
Misi 3 :				
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang berintegritas, profesional dan responsive				
Program Kerja :				
Semua				
Sasaran :				
Maju pelayanan publik berkualitas; Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel Maju Aparatur yang Berkualitas				
1	Program Pengembangan Statistik,	<b>Optimalisasi Reformasi Birokrasi</b>	1. Kewenangan yang masih tumpang tindih antar sesama perangkat daerah; 2. Kurangnya pemahaman tentang pengelolaan data .	Dijalankannya kebijakan pusat data
2	Program Pengembangan Komunikasi Publik	<b>Mendorong pengutamaan kepentingan publik oleh pelayanan publik dengan pelayanan birokrasi berbasis IT; Revitalisasi infrastruktur pelayanan publik; Menciptakan pelayanan publik terpadu, tepat, dan inklusif; Melakukan koordinasi dengan pembuatan pelaku bisnis.</b>	Belum adanya proses pengelolaan informasi yang tidak terpusat	1. Adanya website PPID Utama;
3	Program Pengelolaan Informasi Publik dan Media Massa			2. Adanya literasi digital ; 3. Adanya pengelolaan medsos; 4. Adanya SPM PPID.
4	Program Pelayanan E-Government		Kewenangan yang masih tumpang tindih antar sesama perangkat daerah;	1. Adanya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5	Program Pengembangan Persandian, Siber dan Keamanan Informasi		Sulitnya menerapkan Sistem penyelenggaraan berbasis elektronik.	2. Adanya penerpan Indeks Keamanan Informasi; 3. Adanya UU ITE. 4. Kegiatan pengembangan komunikasi dan pemanfaatan TIK bidang pendapatan daerah
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Kurangnya pemahaman tentang Standar Gedung Pelayanan Publik	Perlu adanya masterplan Gedung pelayanan publik komunikasi dan informasi e-sumsel
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Urusan Penunjang	Anggaran
Misi 4 :				



Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saling daerah dengan memperitmbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah				
Sasaran : Maju infrastruktur dan konektivitas				
2	Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Peningkatan Konektivitas akses TIK	Kurangnya kesadaran dan kapasitas Aparatur akan pentingnya penggunaan TIK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan	Menjadi Prioritas Daerah
Misi 5 : Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pada pariwisata religious				
Program Kerja : Menekankan tingkat kemiskinan guna memperkecil kesenjangan sosial yang dapat melahirkan konflik social				
Sasaran : Maju stabilitas keamanan, ketertiban dan kehidupan beragama				
1	Program Pengembangan Komunikasi Publik	Perbedaan antara keterkaitan arah kebijakan RPJMD dengan arah kebijakan pembangunan nasional (pada Prioritas Nasional Persandian dan Statistik termasuk dalam Stabilitas Pertahanan dan Keamanan)	-	-
2	Program Pengelolaan Informasi Publik dan Media Massa			

### 3.2.3 Visi dan Misi Diskominfo Prov. Sumsel

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2023 dan juga mengacu pada Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Penetapan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan berlandaskan pada tugas pokok dan fungsi Dinas yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Komunikasi dan Informatika, serta bidang Persandian dan Statistik.

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, disamping itu visi ini juga merupakan pemandu arah bagi institusi dalam menyusun dan melaksanakan program dan



kegiatannya. Berdasarkan uraian diatas, adapun Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel ditetapkan sebagai berikut:

**“Sumatera Selatan Maju berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.”**

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi di atas, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dengan mengacu pada misi ketiga dan keempat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu **misi ketiga** : *“Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsive”* dan **misi keempat** *“Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saling daerah dengan memperitmbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah”*. Dalam mendukung misi ketiga dan keempat tersebut, maka disusunlah 4 (empat) Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

1. Misi Pertama :

**Meningkatkan Kualitas dan kuantitas SDM TIK**

2. Misi Kedua :

**Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Komunikasi dan Informatika guna Percepatan Pembangunan (Peningkatan Akses Teknologi Informasi Komunikasi)**

3. Misi Ketiga :

**Tata kelola Reformasi Birokrasi dan Transformasi Pemerintah Berbasis Teknologi serta Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam rangka keterbukaan Informasi Publik**

4. Misi Keempat :

**Mendorong Peningkatan Perekonomian melalui pertumbuhan Startup Digital**



### 3.3 Analisa Isu-Isu Strategis Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan permasalahan yang terkait tugas dan fungsi Dinas Kominfo Prov. Sumsel, Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur serta dokumen Renstra K/L, maka dapat ditarik suatu kesimpulan isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Kominfo Prov. Sumsel tahun 2017-2018 yaitu :

1. Optimalisasi pemberian akses informasi kepada masyarakat demi memenuhi tuntutan publik akan keterbukaan dan transparansi informasi;
2. Optimalisasi penyediaan infrastruktur TIK dari sisi kualitas maupun kuantitas;
3. Optimalisasi peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM Kominfo;
4. Optimalisasi penyelenggaraan tata kelola *e-Government*;
5. Meningkatkan pengetahuan sumber daya aparatur dalam menggunakan TIK (*Management Knowledge*);
6. Meningkatkan pengelolaan hubungan dengan semua *stakeholders*.

### 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Penyebaran Informasi/Data	-	-	Keterbukaan informasi  Leading Sektor/Pusat Data



**Tabel 3.5**  
**Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah**  
**Provinsi Sumatera Selatan**

<i>Urusan Komunikasi dan Informatika :</i>					
No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Infrastruktur TIK	Wilayah pedalaman dan pedesaan	Program Infrastruktur	Jaringan terintegrasi antar wilayah menuju smart province	Lokasi strategis dalam wilayah kota kabupaten
				Melayani jaringan internet wilayah perkotaan dan pedesaan	Lokasi strategis dalam wilayah kota kabupaten
				Pengembangan TIK untuk mendukung e-Government	Lingkup OPD Provinsi



#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kominfo Prov. Sumsel**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan diatas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah untuk dapat diraih selama lima tahun ke depan sebagai berikut :

1. Sumber Daya manusia TIK yang profesional;
2. Infrastruktur Komunikasi dan Informatika sampai pedalaman dan perbatasan (Infrastruktur berkualitas, handal, berkelanjutan, tahan lama dan terjangkau);
3. Tata kelola administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui penerapan *e government*;
4. Akses informasi mudah dan tersebar secara massif bagi masyarakat akan hasil-hasil pembangunan yang transparan dan akuntabel;
5. Pelayanan persandian dan pemanfaatan sistem informasi berklasifikasi yang aman;
6. Pelayanan publik yang berkualitas mudah dan dapat dijangkau melalui pemanfaatan sarana dan prasana TIK;
7. Jumlah startup digital bagi UMKM meningkat.

Selanjutnya untuk menjamin bahwa tujuan diatas dapat dicapai, maka tujuan tersebut haruslah memiliki sasaran untuk mengukur masing - masing tujuan tersebut. Sasaran dari masing - masing Tujuan diatas adalah sebagai berikut :



#### Tujuan Pertama

Sasaran dari Tujuan Pertama adalah :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur di bidang TIK
2. Meningkatnya SDM masyarakat pengguna TIK

#### Tujuan Kedua

Sasaran dari Tujuan Kedua adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan jaringan komunikasi yang dapat dijangkau oleh masyarakat sampai pedesaan;
2. Tersedianya akses internet 4G bagi masyarakat terluar dan perbatasan.

#### Tujuan Ketiga

Sasaran dari Tujuan Ketiga adalah :

1. Efektif dan efisienya tata kelola pemerintah berbasis elektronik;
2. Modernisasi layanan administrasi perkantoran.

#### Tujuan Keempat

Sasaran dari Tujuan Keempat adalah :

1. Tersedianya data statistik sektoral yang terintegrasi dan akurat secara online;
2. Terlaksananya pemberdayaan dan pengembangan kapasitas media/kelompok informasi dan komunikasi masyarakat Sumsel;
3. Berfungsinya kelembagaan PPID dalam memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik secara baik dan procedural;
4. Meningkatnya partisipasi dalam melakukan dieminasi informasi.

#### Tujuan Kelima

Sasaran dari Tujuan Kelima adalah :

1. Meningkatnya OPD yang memanfaatkan layanan persandian dan pengamanan Informasi yang berklasifikasi;
2. Memanfaatkan surel aplikasi *Sanapati* untuk pengiriman informasi yang urgen dan rahasia.



#### Tujuan Keenam

Sasaran dari Tujuan Keenam adalah :

1. Meningkatnya jumlah pelayanan publik berbasis TIK yang berkualitas nyaman dan aman.
2. Adanya komitmen dari semua aparatur untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

#### Tujuan Ketujuh

Sasaran dari Tujuan Ketujuh adalah :

1. Meningkatnya jumlah dunia usaha UMKM yang memanfaatkan *e commerce*;
2. Tumbuh dan berkembangnya startup-startup baru.

Berikut tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel terkait tupoksinya seperti pada tabel di bawah ini;

**Tabel 4.1 (TC – 25)**  
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Prov. Sumsel**  
**Tahun 2019 - 2023**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Target Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
<b>Visi : “Masyarakat Sumatera Selatan Maju berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi”.</b>										
1.	Sumber Daya manusia TIK yang profesional	Persentase SDM terpenuhi	Maju Aparatur Berintegritas	Nilai Maturitas SPIP	Jumlah peserta aparatur yang diberi pendidikan  Jumlah peserta yang diberi pelatihan	50 org  50 org	100 org  100 org	150 org  150 org	170 org  170 org	200 org  200 org
<b>Misi 2 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Komunikasi dan Informatika guna Percepatan Pembangunan.</b>										
2.	Infrastruktur Komunikasi dan Informatika sampai pedalaman dan perbatasan (Infrastruktur Berkualitas, handal, berkelanjutan, tahan lama dan terjangkau)	Persentase pemberdayaan infrastruktur TIK	Maju Infrastruktur dan Konektivitas	Persentase akses internet	Jumlah wilayah yang difasilitasi	10 desa di kab/kota	10 desa di kab/kota	10 desa di kab/kota	10 desa di kab/kota	50 desa di kab/kota
<b>Misi 3 : Tata Kelola Reformasi Berokrasi Pemerintah berbasis Teknologi menuju Keterbukaan Informasi.</b>										



3.	Tata kelola administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui penerapan <i>e government</i>	Persentase pengguna layanan e-Government	Maju Pelayanan Publik	Persentase pengguna layanan e-government	Jumlah domain dan subdomain website sumsel	6 Aplikasi				
4.	Akses informasi mudah dan tersebar secara massif bagi masyarakat akan hasil-hasil pembangunan yang transparan dan akuntabel	Indeks keterbukaan Informasi	Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel	Indeks keterbukaan Informasi	Persentase informasi yang diterima dan ditindaklanjuti	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %
					Cakupan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas Media/kelembagaan informasi masyarakat Sumsel	80 %	80 %	90 %	90 %	100 %
					Cakupan diseminasi Informasi melalui kerjasama media/tata kelola ruang informasi publik					
5.	Pelayanan persandian dan pemanfaatan sistem informasi berklasifikasi yang aman	Indeks KAMI(keamanan Informasi)	Persentase penyelenggaraan pengamanan informasi	Jumlah penyelenggaraan pengamanan informasi	Jumlah pengamanan informasi/berklasifikasi	4 Kab/Kot dan 9 OPD	4 Kab/Kot dan 9 OPD	4 Kab/Kot dan 9 OPD	5 Kab/Kot dan 9 OPD	5 Kab/Kot dan 9 OPD
6.	Pelayanan publik yang berkualitas mudah dan dapat dijangkau melalui pemanfaatan sarana dan prasana TIK	Indeks SPBE	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah aplikasi Pelayanan Publik berbasis TIK	Jumlah OPD yang difasilitasi Internet	50 OPD/17 kab/kota				
7.	PPID dan KI	Indeks keterbukaan Informasi	Maju Pelayanan Publik	Jumlah informasi publik	Jumlah informasi yang dipublikasi					



8.	Data statistik sektoral yang menjadi urusan daerah (termasuk Kab/Kota-Sumsel Satu Data)	Persentase jenis pengembangan statistik sektoral yang menjadi urusan daerah (Integrasi Data se -SumSel)		Total data sektoral yang tersedia	Jumlah validasi data sektoral	50 OPD				
<b>Misi 4 : Meningkatkan perekonomian dengan mendorong Pertumbuhan melalui Startup Digital</b>										
7.	Jumlah startup digital bagi UMKM meningkat	Persentase pengguna layanan e-government	Maju Kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya jumlah dunia usaha yang memanfaatkan Startup Digital	Frekuensi Literasi digital	70 %	70 %	80 %	90 %	100 %

**Revisi Tabel 4.1 (TC – 25)**

**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Prov. Sumsel  
Tahun 2019 – 2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN		
					TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1.	TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)	1 TERWUJUDNYA KETERBUKAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK BADAN PUBLIK TINGKAT PROVINSI	1.1 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	1 PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENJADI SASARAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK, MENGETAHUI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	80%	80%	100%
				2 CAKUPAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT/PUBLIK	4	5	2
		2 TERWUJUDNYA DATA / INFORMASI YANG HANDAL/BAIK TEKNOLOGI KOMUNIKASI MILIK DAERAH (SUMSEL SATU DATA)	1 INDEKS PEMERINGKATAN SPBE (PERINGKAT NASIONAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS) ELEKTRONIK	3 PERSENTASE OPD YANG MENGGUNAKN DATA STATISTIK DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100%	100%	100%



			4	PERSENTASE OPD YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MELAKUKAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	100%	100%	100%
		3 TERWUJUDNYA KEPEMERINTAHAN BERBASIS TIK (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) PROVINSI SUMATERA SELATAN	5	PERSENTASE AKSES INTERNET	85%	87%	90%
			6	PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	40%	50%	70%
			7	PERSENTASE LAYANAN PENGGUNA E-GOVERNMENT	100%	100%	100%
			8	TINGKAT KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH	80%	100%	100%



**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**5.1 Strategi dan Kebijakan**

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2023.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan.

**Tabel 5.1**  
**Strategi - Kebijakan**

No	Strategi	Kebijakan
1.	Mengembangkan pendayagunaan data/ Informasi berbasis Elektronik	- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik. Lama mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menerapkan.
2.	Membangun ekosistem TIK melalui sesama OPD provinsi sampai dengan kab/kota se-sumsel menuju Smart Province	- Menjadikan Sumsel sebagai Smart Province dengan menghubungkan semua kab/kota dalam system integrasi terpadu
3.	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola Pelayanan Publik	- Menetapkan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka efektivitas ketatalaksanaan pelayanan publik melalui integrasi database publik
4.	Memenuhi kuantitas dan kualitas data pemenuhan kebutuhan stackholder dalam pengelolaan data/informasi berdaya guna	- Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan dat/informasi sectoral pemerintahan.
5.	Memanfaatkan koordinasi baik vertical maupun horizontal dalam kegiatan	- Meningkatkan pemanfaatan media massa, media online, media sosial dan media luar ruang



pengelolaan data/informasi berikut keamanan informasi secara elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan dan pemberdayaan keamanan informasi</li> <li>- Optimalisasi pengelolaan data statistik sectoral</li> </ul>
---	--

Dari kelima strategi di atas menjadi rumusan untuk mencapai keberhasilan dari suatu program dan kegiatan yang berlandaskan dan berpedoman pada arah kebijakan tersebut.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menerapkan strategi dan arah kebijakan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan mengklasifikasi dan melakukan identifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut:

Tabel 5.2  
Faktor Internal dan Eksternal

Faktor Internal			
No	Kekuatan ( <i>Strength</i> )	No	Kelemahan ( <i>Weakness</i> )
1	Tersedianya Sumberdaya Manusia yang cukup	1	Terbatasnya sumberdaya manusia yang terampil dan Professional
2	Tersedianya anggaran	2	Kurangnya kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database SKPD
3.	Tersedianya sarana prasarana yang memadai	3.	Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi
		4.	Belum optimalnya pengembangan aplikasi
		5.	Tugas dan fungsi masih tumpang tindih dengan OPD lain
		6.	Belum adanya tata kelola pengelolaan Data Center
Faktor Eksternal			
No	Peluang ( <i>Opportunities</i> )	No	Ancaman ( <i>Threats</i> )
1.	Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo	1.	Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan
2.	Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan	2.	Kesenjangan informasi di masyarakat
3.	Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik	3.	Pesatnya perkembangan TIK



4.	Kebutuhan pengembangan muatan e-Government	4.	Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata
5.	Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi	5.	Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK
6.	Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan	6.	Bentuk kelembagaan Kominfo di daerah yang beragam
7.	Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo	7.	Data yang tidak akurat dan terpercaya
8.	Tersedianya produk administrasi data sectoral	8.	Sulitnya memetakan ketersediaan dan kebutuhan data

Tabel 5.3  
Penentuan Strategi  
Pencapaian Indikator Sasaran

Faktor Eksternal	<p><b>Peluang :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo</li> <li>2. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan</li> <li>3. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik</li> <li>4. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government</li> <li>5. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi</li> <li>6. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan</li> <li>7. Kebutuhan Pembangunan smart province</li> <li>8. Tersedianya produk administrasi data sectoral</li> <li>9. Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo</li> </ol>	<p><b>Tantangan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik</li> <li>2. Kesenjangan informasi di masyarakat</li> <li>3. Pesatnya perkembangan TIK</li> <li>4. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata</li> <li>5. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK</li> <li>6. Bentuk kelembagaan Kominfo di daerah yang beragam</li> <li>7. Kebutuhan kluster governance, environment dan mobility dari smart province</li> <li>8. Data yang tidak akurat dan terpercaya</li> <li>9. Sulitnya memetakan ketersediaan dan kebutuhan data</li> </ol>
Faktor Internal	<p><b>Kekuatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Sumberdaya Manusia yang cukup</li> <li>2. Tersedianya anggaran</li> <li>3. Tersedianya sarana prasarana yang memadai</li> <li>4. Terbangunnya smart province di Provinsi Sumatera Selatan</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pendayagunaan media informasi melalui peningkatan kualitas SDM</li> <li>2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang didukung SDM yang cukup</li> <li>3. Meningkatkan pendayagunaan media informasi melalui sarana prasarana secara optimal</li> <li>4. Meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media</li> </ol>
	<p><b>Alternatif Strategi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dalam mendukung pendayagunaan media informasi</li> <li>2. Meningkatkan kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik</li> <li>3. Memberdayakan potensi komunikasi masyarakat melalui pendayagunaan media informasi</li> <li>4. Meningkatkan pengembangan dan</li> </ol>	



	<p>informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Membangun smart Province yang didasari integrasi aplikasi dan integrasi data</li> <li>6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemenuhan permintaan data dan hasil pengelolaannya bagi stakeholders.</li> <li>7. Melakukan koordinasi baik vertikal maupun horisontal dalam kegiatan pengelolaan data dan statistik</li> </ol>	<p>pemanfaatan aplikasi TIK dalam rangka mengembangkan muatan e-government dan kualitas pelayanan publik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Memberdayakan potensi komunikasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik</li> <li>6. Menyusun tata kelola smart province yang mencakup governance, environment dan mobility</li> <li>7. Penyajian data dan hasil pengelolaannya yang berkualitas dalam bentuk yang mudah dimengerti</li> <li>8. Menyusun Matriks Data OPD</li> <li>9. Mengumpulkan Data sesuai dengan Matriks Data</li> <li>10. Membentuk Forum Data</li> </ol>
<p><b>Kelemahan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional</li> <li>2. Kurangnya kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database SKPD</li> <li>3. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat</li> <li>4. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK</li> <li>5. Belum disusunnya smart Province</li> <li>6. Tugas dan Fungsi masih tumpang tindih dengan OPD lain</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan SDM dalam menghadapi Globalisasi informasi</li> <li>2. Mengembangkan kapasitas SDM aparatur dan masyarakat dalam bidang Kominfo yang siap menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi</li> <li>3. Meningkatkan kebutuhan SDM untuk mengurangi Kesenjangan informasi di masyarakat</li> <li>4. Meningkatkan sarana prasarana guna menunjang kebutuhan Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik</li> <li>5. Meningkatkan sarana prasarana guna mengurangi Kesenjangan informasi di masyarakat</li> <li>6. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang operasional Kominfo</li> <li>7. Menyusun rencana induk smart province</li> <li>8. Menyusun Juknis Pengelolaan dan Statistik</li> <li>9. Perekrutan Pegawai bidang statistik</li> <li>10. Meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan Bimbingan teknis bidang statistik</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan sistem Informasi dalam menghadapi globalisasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik</li> <li>3. Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga komunikasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi</li> <li>4. Meningkatkan kemampuan potensi informasi masyarakat untuk mengurangi kesenjangan informasi</li> <li>5. Meningkatkan infrastruktur TIK yang menunjang kebutuhan integrasi sistem informasi dan database dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik</li> <li>6. Mengoptimalkan kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi guna mengurangi Kesenjangan informasi di masyarakat</li> <li>7. Meningkatkan pemberdayaan potensi informasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi informasi</li> <li>8. Mempercepat pembangunan smart province</li> </ol>



## BAB VI

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam Rencana Strategis Tahun 2019 - 2023 merencanakan 10 Program dan 60 Kegiatan yang meliputi indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dijabarkan sebagai berikut:

### **6.1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**

Indikator Kinerja adalah indeks kepuasan masyarakat aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor.

Target Kinerja adalah capaian kinerja bidang Sekretariat ditargetkan mulai tahun 2019 - 2023 adalah 100% terpenuhinya layanan administrasi perkantoran.

### **6.2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**

Indikator Kinerja adalah persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi.

Target Kinerja adalah capaian kinerja bidang Sekretariat ditargetkan mulai tahun 2019 - 2023 adalah 100% terpenuhinya layanan administrasi perkantoran.

### **6.3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**

Indikator Kinerja adalah persentase kelembagaan yang tepat fungsi.

Target Kinerja adalah capaian kinerja bidang Sekretariat ditargetkan mulai tahun 2019 - 2023 adalah 5 tahun terpenuhinya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah.

### **6.4 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**

Indikator Kinerja adalah jumlah konsultasi dan koordinasi dengan OPD terkait.



Target Kinerja adalah capaian kinerja bidang Sekretariat ditargetkan mulai tahun 2019 - 2023 adalah selama 5 tahun yang terdiri dari koordinasi dan konsultasi peningkatan kinerja kelembagaan Komunikasi dan informatika dalam rangka memberikan pelayanan penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

## **6.5 PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK**

Indikator Program adalah persentase data statistik sektoral.

Target Kinerja adalah capaian kinerja Bidang Pengelolaan Data dan Statistik dari Tahun 2019 - 2023 adalah:

1. Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik;
2. Analisa Data Statistik Sektoral;
3. Peningkatan Kapasitas SDM;
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan;
5. Sosialisasi Statistik Sosial, Kependudukan, Ekonomi, Pertanian dan TIK.

## **6.6 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI PUBLIK**

Indikator Program adalah jumlah partisipasi aktif lembaga komunikasi publik dalam pengelolaan komunikasi publik.

Target Kinerja adalah capaian kinerja Bidang Komunikasi Publik ditargetkan dari mulai tahun 2019 - 2023 yang diuraikan, antara lain :

1. Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat;
2. Rakorda Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat;
3. Peningkatan Kapasitas Iklan Layanan Masyarakat melalui Radio dan Televisi;
4. Layanan Radio Streaming;
5. Bimtek Peningkatan SDM Kehumasan;
6. Publikasi melalui Media Luar Ruang.

## **6.7 PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TIK**

Indikator Program adalah persentase pemeliharaan jaringan TIK OPD Provinsi Sumatera Selatan.

### **1. Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan TIK**

Indikator Kinerja adalah meliputi :



- a. Jumlah bandwidth yang dikelola di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Jumlah kebijakan standar infrastruktur;
- c. Jumlah workshop/FGD/sosialisasi;
- d. Jumlah backbone jaringan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (*Smart Province*);
- e. Terbentuknya Dewan TIK daerah;
- f. Jumlah kegiatan yang didukung oleh Forum Komunikasi Pegiat TIK dan Relawan TIK Sumatera Selatan;
- g. Pengembangan Internet dan Web Desa;
- h. Kegiatan yang didukung oleh Forum Komunikasi Pegiat TIK dan relawan TIK Sumatera Selatan;
- i. Jumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Bidang TIK yang telah tersosialisasi.

Target Kinerja adalah dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat, membuat semua sektor memanfaatkan teknologi informasi khususnya melalui internet dalam proses bisnisnya. Termasuk juga dalam melaksanakan pelayanan serta penyebarluasan informasi, pemanfaatan teknologi informasi semakin pesat. Namun dalam pelaksanaannya beberapa kendala masih ditemukan, terutama yang ada pada UPT yang berlokasi di daerah terpencil (*remote area*), belum ada infrastruktur jaringan internet yang baik atau kapasitas bandwidth yang dimiliki masih kurang.

Dengan adanya permasalahan tersebut, kegiatan ini dipergunakan untuk membangun/mengembangkan jaringan internet baik itu jumlah kapasitas bandwidth maupun koneksitas antar OPD maupun OPD dengan UPT yang dinilai membutuhkan akses point serta memfasilitasi UPT dalam rangka memperoleh akses internet dengan kecepatan yang layak. Fasilitasi untuk jaringan internet tidak hanya dilakukan pada OPD, namun juga pada kegiatan yang bersifat temporer baik yang berskala lokasi maupun nasional.

Pada tahun 2019 akan dibuat suatu standart jaringan yang akan diberlakukan kepada seluruh OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan standar itu diharapkan jaringan TIK seluruh OPD menggunakan platform yang sama.



Dengan demikian, pemantauan, pengendalian dan pemeliharaan jaringan dapat dilakukan dengan optimal.

Capaian Kinerja adalah jumlah bandwidth, workshop/FGD/sosialisasi dan jumlah dokumen standar jaringan.

## **2. Kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur TIK**

Indikator Kinerja adalah jumlah pemeliharaan perangkat keras dan lunak (data center).

Target Kinerja adalah kebutuhan jaringan TIK pada OPD dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mengoptimalkan perangkat jaringan (keamanan jaringan) di OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sehingga gangguan masalah jaringan di OPD dapat diatasi. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan pemeliharaan (*maintenance*) berskala di OPD serta panggilan insidentil dari OPD yang mengalami gangguan perihal jaringannya dimana akan dilakukan pemeriksaan serta penggantian peralatan yang sekiranya dapat dilakukan. Selain itu jika diperlukan, juga dimungkinkan pemberian saran kepada OPD perihal pengembangan ataupun solusi lain perihal jaringan di OPD.

## **3. Kegiatan Pengendalian Infrastruktur TIK**

Indikator Kinerja adalah jumlah monitoring dan pengendalian jaringan TIK OPD.

Target Kinerja adalah melakukan monitoring dan pengendalian bandwidth dan jaringan yang dilakukan mencakup OPD yang telah tekoneksi dengan VPN Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan total bandwidth internet sebesar 300 Mbps dan 120 Mbps bandwidth intranet OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Data existing pada tahun 2019 intranet dan internet OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meliputi sebagai berikut :



NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	LAYANAN / BANDWITH	
		VPN IP	INTERNET
	<b>DINAS</b>		
1	DINAS PENDIDIKAN	1 MBPS	5 MBPS
2	DINAS KESEHATAN	1 MBPS	5 MBPS
3	DINAS PU BM DAN TATA RUANG	1 MBPS	5 MBPS
4	DINAS PSDA	1 MBPS	5 MBPS
5	DINAS PERKIM	1 MBPS	5 MBPS
6	DINAS SOSIAL	1 MBPS	5 MBPS
7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1 MBPS	5 MBPS
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PPA	1 MBPS	5 MBPS
9	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	1 MBPS	5 MBPS
10	DINAS LH DAN PERTANAHAN	1 MBPS	5 MBPS
11	DINAS DUKCAPIL	1 MBPS	5 MBPS
12	DINAS PMD	1 MBPS	5 MBPS
13	DINAS PERHUBUNGAN	1 MBPS	5 MBPS
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	53 MBPS	120 MBPS
15	DINAS KOPERASI UKM	1 MBPS	5 MBPS
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	5 MBPS	5 MBPS
17	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1 MBPS	5 MBPS
18	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1 MBPS	5 MBPS
19	DINAS PERPUSTAKAAN	1 MBPS	5 MBPS
20	DINAS KEARSIPAN DAERAH	1 MBPS	5 MBPS
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1 MBPS	5 MBPS
22	DINAS PERTANIAN TP DAN HORTIKULTURA	1 MBPS	5 MBPS
23	DINAS PERKEBUNAN	1 MBPS	5 MBPS
24	DINAS KEHUTANAN	1 MBPS	5 MBPS
25	DINAS ENERGI DAN SDM	1 MBPS	5 MBPS
26	DINAS PERINDUSTRIAN	1 MBPS	5 MBPS
27	DINAS PERDAGANGAN	1 MBPS	5 MBPS
	<b>BADAN</b>		
1	BAPPEDA	1 MBPS	5 MBPS
2	BAPENDA	1 MBPS	5 MBPS
3	BADAN PENGHUBUNG	1 MBPS	5 MBPS
4	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1 MBPS	5 MBPS
5	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1 MBPS	5 MBPS
6	BADAN PENGEMBANGAN SDM	1 MBPS	5 MBPS
7	BADAN LITBANG DAERAH	1 MBPS	5 MBPS
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1 MBPS	5 MBPS
9	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1 MBPS	5 MBPS
	<b>BIRO</b>		



1	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1 MBPS	5 MBPS
2	BIRO HUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA	1 MBPS	5 MBPS
3	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	1 MBPS	5 MBPS
4	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	1 MBPS	5 MBPS
5	BIRO ORGANISASI	1 MBPS	5 MBPS
6	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTDA	1 MBPS	5 MBPS
7	BIRO PEREKONOMIAN	1 MBPS	5 MBPS
8	BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN	1 MBPS	5 MBPS
9	BIRO PENGADAAN BARANG / JASA	5 MBPS	25 MBPS

Capaian Kinerja adalah optimalnya jumlah bandwidth yang ada beserta pengelolaannya sehingga benar-benar dapat mendukung kinerja OPD. Pada 2019, jumlah keseluruhan bandwidth dari 48 OPD yang dikendalikan dan dimonitor sebesar 360 Mbps Internet dan 100 Mbps VPN. Selain itu untuk meningkatkan kualitas dari operator jaringan TIK, secara berkala akan dilakukan Bimtek troubleshooting jaringan dimana untuk tahun 2019.

## **6.8 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN MEDIA MASSA**

Indikator Program adalah jumlah layanan informasi dan saluran media.

Target Kinerja adalah capaian kinerja Bidang Pengelolaan Informasi Publik ditargetkan dari mulai tahun 2019 - 2023 yang diuraikan melalui 3 kegiatan utama, antara lain :

### **1. Kegiatan Layanan Informasi Publik**

Indikator Kinerja adalah jumlah layanan pengaduan masyarakat.

Target Kinerja adalah untuk melaksanakan kegiatan terkait dengan implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di dalam UU tersebut dijelaskan bahwa setiap Badan Publik Pemerintah maupun Non Pemerintah wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi baik perorangan maupun kelompok masyarakat. Informasi yang disediakan harus akurat, benar dan



tidak menyesatkan serta dapat diakses dengan cara yang mudah dan murah oleh publik.

Di dalam memberikan layanan informasi kepada publik, Badan publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang memiliki tugas di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Sejauh ini peran dan fungsi PPID belum berjalan sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu guna mewujudkan amanat UU KIP dimaksud perlu upaya peningkatan peran dan fungsi PPID utamanya dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat transparansi informasi pengelolaan anggaran di satuan kerjanya.

Untuk meningkatkan peran dan fungsi PPID OPD dan Kabupaten/Kota, Dinas Kominfo selaku PPID Utama Provinsi Sumatera Selatan perlu memfasilitasi berbagai kegiatan, antara lain :

- a. Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas PPID Utama dan Pembantu Prov. Sumsel;
- b. Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi (KI);
- c. Penguatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- d. Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Publik (SAIK);
- e. Publikasi Informasi Daerah;
- f. Penguatan Media Center;
- g. Penguatan Kelembagaan dan Sosialisasi Laport SP4N;
- h. Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik.

## **6.9 PROGRAM PELAYANAN E-GOVERNMENT**

Dengan melihat isu-isu strategis Sumatera Selatan dan perkembangan globalisasi, Bidang E-Government dipandang perlu untuk menyusun kegiatan yang dapat mengakomodasi peranan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik pada masa yang akan datang.

Indikator Program adalah persentase layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Indeks SPBE).



Target Kinerja adalah capaian kinerja bidang E-Government ditargetkan dari mulai tahun 2019 - 2023 kegiatan antara lain :

### **1. Kegiatan Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Indikator Kinerja meliputi :

- a. Jumlah kebijakan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. Persentase aplikasi yang memenuhi standar keamanan informasi.

Target Kinerja adalah menuju *Sumsel Smart Province* beberapa hal yang menjadi prioritas utama adalah review Rencana Induk TIK Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pembuatan kebijakan serta pemberdayaan TIK masyarakat khususnya *e-commerce*. Dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui TIK ini tentunya tidak bisa dilakukan pemerintah saja tetapi juga merangkul komunitas-komunitas pegiat TIK dan UMKM.

Upaya pelaksanaan kegiatan Penerapan Tata Kelola TIK Pemerintahan akan dilaksanakan dengan melalui tahapan sub-sub kegiatan meliputi :

- a. Review Rencana Induk TIK;
- b. Sertifikasi ISO 270001 Data Center Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- d. Penyusunan Kebijakan Pengembangan Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- e. Peningkatan Kapasitas SDM TIK (Bimtek, Sertifikasi BNSP, Sertifikasi Internasional);
- f. Pemberdayaan TIK Masyarakat (workshop TIK untuk UMKM);
- g. Peningkatan website Perangkat Daerah dan kabupaten/kota;
- h. Pembentukan CIO;
- i. Pembentukan Komite Pengarah TIK;
- j. Forum Komunikasi Pegiat TIK dan Relawan TIK Sumatera Selatan;



- k. FGD pembahasan program kegiatan komunikasi Pegiat TIK dan relawan TIK Sumatera Selatan;
- l. Sosialisasi Kebijakan.

Capaian Kinerja :

- a. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Sertifikasi SNI/ISO 270001 Data Center Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. SOP Tata Kelola TIK, Persandian dan Keamanan Informasi, Pengembangan Aplikasi;
- d. Kebijakan Pengembangan Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- e. Jumlah SDM yang memiliki kompetensi TIK (bimtek, sertifikasi BNSP, Sertifikasi Internasional);
- f. Jumlah UMKM di Sumatera Selatan yang memiliki domain;
- g. Jumlah Website terbaik Perangkat Daerah dan Pemerintah kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
- h. Jumlah aplikasi Perangkat Daerah yang terintegrasi serta Jumlah aplikasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersimpan di Server data center Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;

## **2. Kegiatan Penguatan Fungsional Aplikasi**

Indikator Kinerja Fungsional Aplikasi adalah jumlah aplikasi pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang memenuhi kriteria peraturan yang berlaku.

Target Kinerja adalah dalam rangka mewujudkan *Smart Province* kegiatan ini akan difokuskan pada pembuatan aplikasi baru dan integrasi aplikasi yang sudah ada. Selain itu akan dibangun Command Center dengan mengintegrasikan aplikasi yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dan memproses informasi yang



dibutuhkan dalam pembuatan keputusan untuk mendukung respon suatu kejadian penting secara cepat.

Untuk pelaksanaan kegiatan Penguatan Fungsional Aplikasi akan dilaksanakan dengan melalui tahapan sub-sub kegiatan meliputi :

- a. Pengadaan aplikasi SPBE dan Command Center;
- b. Pembuatan aplikasi e-sumsel, meliputi :
  1. Pengembangan aplikasi e new budgeting;
  2. Workshop aplikasi;
  3. Workshop aplikasi finger online;
  4. Assesment aplikasi;
  5. Maintenance aplikasi;
  6. Aplikasi email;
  7. Aplikasi dashboard;
  8. Aplikasi media intelligence;
  9. Aplikasi Lapor SP4N;
  10. Pengembangan command center.

Capaian Kinerja :

- a. Terimplementasikannya aplikasi;
- b. Terimplementasikannya aplikasi e-controlling;
- c. Terintegrasinya Aplikasi Pertanian dan Pengairan;
- d. Terimplementasikannya aplikasi e - new budgeting;
- e. Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Workshop aplikasi;
- f. Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Workshop aplikasi finger online;
- g. Jumlah Aplikasi yang telah di-assesment;
- h. Terimplementasikannya aplikasi;
- i. Optimalnya penggunaan email dengan domain sumselprov.go.id;
- j. Terimplementasikannya command center Provinsi Sumatera Selatan.

#### **6.10 PROGRAM PENGEMBANGAN PERSANDIAN, SIBER DAN KEAMANAN INFORMASI**

Indikator Kinerja adalah jumlah aplikasi dan informasi berklasifikasi yang diamankan.



Target Kinerja adalah seiring dengan semakin maraknya serangan siber terhadap situs pemerintah maka keamanan informasi harus mendapatkan perhatian utama. Beberapa hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan awareness tentang keamanan informasi kepada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan. Di samping itu dilakukan pula penguatan peralatan dan aplikasi untuk mendukung keamanan informasi. Perguruan Tinggi (Unsri, Mdp dan Bina Darma) juga dilibatkan untuk mengatasi insiden keamanan informasi.

Untuk pelaksanaan kegiatan Persandian dan Keamanan Informasi akan dilaksanakan dengan melalui tahapan sub-sub kegiatan meliputi :

1. Assesment aplikasi OPD dengan menggunakan indeks KAMI;
2. Operasional sandiman;
3. Pembentukan tim keamanan informasi;
4. FGD keamanan informasi bagi OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
5. Pelatihan bagi penanggungjawab keamanan informasi bagi kabupaten/kota se-Sumatera Selatan;
6. Belanja alat keperluan persandian;
7. Belanja license yang mendukung keamanan informasi (anti virus, OS Server, perpanjangan domain);
8. Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.

Capaian Kinerja :

1. Jumlah aplikasi OPD yang sesuai dengan indeks KAMI;
2. Jumlah kegiatan persandian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terlaksana;
3. Terbentuknya Tim Keamanan Informasi;
4. Jumlah OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mengikuti FGD keamanan informasi;
5. Jumlah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan yang mengikuti Pelatihan keamanan informasi;
6. Jumlah Peralatan pendukung Persandian;
7. Terimplementasikannya lisensi yang mendukung keamanan informasi (anti virus, OS Server, perpanjangan domain);
8. Optimalnya pemanfaatan aset tidak berwujud.



Revisi Rencana Program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam Rencana Strategis Tahun 2019 - 2023 menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah kemudian dimutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah terdapat beberapa Program, kegiatan dan subkegiatan adalah sebagai berikut :

<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>
<p><b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>  <b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>            1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah            2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>            3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN            4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  <b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>            5. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  <b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>            6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>            7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor            8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor            9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga            10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor            11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan            12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan            13. Fasilitasi Kunjungan Tamu            14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD            15. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>            16. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p>	<p><b>Persentase kebutuhan administrasi perkantoran terpenuhi</b>  <b>Jumlah dokumen pelaporan</b>            Jumlah rencana kerja            Jumlah Kegiatan Rapat Teknis Kominfo  <b>Jumlah tenaga administrasi keuangan</b>            Tenaga ASN            Jumlah tenaga admistrasi  <b>Jumlah Aset Dinas Kominfo yang di asuransikan</b>            Jumlah aset dinas kominfo yang diasuransikan  <b>Jumlah ASN yang mengikuti diklat</b>            Jumlah ASN yang mengikuti diklat  <b>Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran terpenuhi</b>            Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor            Jumlah pemenuhan alat tulis kantor            Jumlah Pemenuhan kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih            Jumlah makan dan minum            Jumlah Pemenuhan kebutuhan cetakan dan penggandaan            Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan            Jumlah makan dan minum            Frekuensi Rapat-rapat            Jumlah Pengelolaan Informasi dan Domentasi Milik Dinas  <b>Jumlah pengadaan aset BMD</b>            Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin</p>



<p>17. Pengadaan Aset Tetap Lainnya</p> <p><b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b></p> <p>18. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>20. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p><b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b></p> <p>21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>22. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>23. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya</p> <p>24. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p><b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b></p> <p><b>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b></p> <p>25. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik</p> <p>26. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik</p> <p>27. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah</p> <p>28. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</p> <p>29. Pengelolaan Media Komunikasi Publik</p> <p>30. Pelayanan Informasi Publik</p> <p>31. Layanan Hubungan Media</p> <p>32. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan</p> <p>33. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik</p> <p>34. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah</p> <p>35. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas</p> <p><b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b></p> <p><b>Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b></p> <p>36. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi</p> <p><b>Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b></p> <p>37. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi</p> <p>38. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah</p>	<p>Jumlah Aset Dinas Kominfo</p> <p><b>Jumlah jasa penunjang administrasi kebutuhan terpenuhi</b></p> <p>Jumlah Surat Menyurat</p> <p>Jumlah Rekening yang dibayar</p> <p>Jumlah tenaga kerja kebersihan kantor, Jumlah mengadakan senam, Jumlah tenaga kerja tidak tetap</p> <p><b>Jumlah pemeliharaan aset BMD</b></p> <p>Jumlah kendaraan dinas/operasional</p> <p>Jumlah pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor</p> <p>Jumlah tiang baliho yang terpelihara</p> <p>Jumlah pemeliharaan gedung kantor</p> <p><b>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota</b></p> <p><b>Persentase informasi yang dikelola dan ditindaklanjuti</b></p> <p>Persentase penerapan UU keterbukaan informasi melalui OPD</p> <p>Jumlah Laporan Opini dan Aspirasi Publik</p> <p>Jumlah pengaduan publik melalui aplikasi lapor</p> <p>Jumlah Iklan Layanan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Informasi melalui Pengelolaan Media Komunikasi Publik</p> <p>Jumlah Publikasi Melalui media luar ruang</p> <p>Jumlah Penayangan Iklan Layanan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>Persentase terwujudnya pengembangan dan pemberdayaan kelompok masyarakat</p> <p>Jumlah Sumber Daya Manunisa yang paham akan bermedia</p> <p>Jumlah sengketa informasi publik dan jumlah badan publik yang paham akan aktualisasi layanan informasi publik</p> <p>Jumlah Informasi dan Publikasi melalui Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan</p> <p><b>Persentase akses internet</b></p> <p><b>Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</b></p> <p><b>Persentase layanan pengguna berbasis e-government (Pelayanan Publik/ Pemerintah)</b></p> <p>Persentase domain dan Subdomain website Pemprov. sumsel yang tersedia</p> <p><b>Persentase Pengguna e-government</b></p> <p>Persentase Pengguna Command Center dan Layanan Data</p> <p>Jumlah Data Center</p>
---	---



<p>39. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah</p> <p>40. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah</p> <p>41. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</p> <p>42. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE</p> <p><b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b></p> <p><b>Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</b></p> <p>43. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</p> <p>44. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi</p> <p>45. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral</p> <p>46. Pengembangan Infrastruktur</p> <p><b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b></p> <p><b>Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b></p> <p>47. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</p> <p>48. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</p> <p><b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</b></p> <p>49. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi</p>	<p>Jumlah Kapasitas Layanan Bandwith Internet</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Lokasi Internet</p> <p>Terlaksananya Pertemuan Dewan TIK Daerah Sumatera Selatan</p> <p>Persentase OPD dan aplikasi yang di monitoring dan evaluasi SPBE</p> <p><b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</b></p> <p><b>Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah</b></p> <p><b>Persentase data yang tersedia</b></p> <p>Jumlah Data perangkat daerah yang berkualitas</p> <p>Jumlah Kab/Kota yang terbina</p> <p>Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PAD Diskominfo</p> <p>Jumlah Dokumen/ Aplikasi Satu Data Sumatera Selatan</p> <p><b>Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah</b></p> <p><b>Jumlah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi</b></p> <p>Jumlah Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</p> <p>Jumlah Layanan Keamanan Informasi CSIRT</p> <p><b>Jumlah koordinasi persandian di daerah</b></p> <p>Jumlah Unit Teknis Persandian Kab/ Kota Penyelenggaraan Pengamanan Persandian sesuai dengan SOP</p>
--	--



**Tabel 6.1 (TC-27)**

No	TUJUAN	SASARAN	PRGOGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ PROGRAM/ KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
						TAHUN 1		TAHUN 2		TAHUN 3		TAHUN 4		TAHUN 5		Target	Rp. (Juta)
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya TIK	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Layanan Komunikasi dan Informasi	Program Pengelolaan Informasi Publik dan Media Massa	Persentase (%) informasi yang dikelola atau ditindaklanjuti	961 Informasi	961 Informasi	9,555,000,000	1150 Informasi	10,475,000,000	1300 Informasi	11,522,500,000	1400 Informasi	12,674,750,000	1500 Informasi	13,942,225,000	1500 Informasi	57,169,475,000
			Publikasi Pembangunan Sumsel	Jumlah Publikasi melalui BALIHO dan LED	1 Tahun	1 Tahun	6,600,000,000	1 Tahun	7,600,000,000	1 Tahun	8,360,000,000	1 Tahun	9,196,000,000	1 Tahun	10,115,600,000	1 Tahun	41,871,600,000
			Produksi Konten Informasi Publik	Jumlah konten informasi publik	Belum tersedianya anggaran	-	-	1 Tahun	200,000,000	1 tahun	220,000,000	1 tahun	242,000,000	1 Tahun	266,200,000	1 Tahun	928,200,000
			Peningkatan Kapasitas Komisi Informasi Prov. Sumsel	Jumlah Sengketa terkait informasi publik yang ditangani, Jumlah monitoring evaluasi pemeringkatan dan sosialisasi	75 sengketa	75 sengketa	1,200,000,000	50 sengketa	1,200,000,000	50 sengketa	1,320,000,000	50 sengketa	1,452,000,000	50 sengketa	1,597,200,000	50 sengketa	6,769,200,000
			Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Prov. Sumsel	Jumlah kelompok/ forum yang mengelola informasi masyarakat	1 Tahun	1 Tahun	75,000,000	1 Tahun	100,000,000	1 Tahun	110,000,000	1 Tahun	121,000,000	1 Tahun	133,100,000	1 Tahun	539,100,000
			Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-METRA)	Jumlah forum binaan yang melaksanakan pertunjukan media tradisional	2 forum	2 forum	75,000,000	4 Forum (Paguyuban, Lawak, Tari dan Theater)	75,000,000	4 Forum (Paguyuban, Lawak, Tari, Theater)	82,500,000	4 Forum (Paguyuban, Lawak, Tari, Theater)	90,750,000	4 Forum (Paguyuban, Lawak, Tari, Theater)	99,825,000	4 Forum (Paguyuban, Lawak, Tari, Theater)	423,075,000
			Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Prov. Sumsel	Persentase penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik melalui OPD	50 OPD	50 OPD	200,000,000	50 OPD	300,000,000	50 OPD	330,000,000	50 OPD	363,000,000	50 OPD	399,300,000	50 OPD	1,592,300,000
			Peningkatan Kapasitas TIM PPID Utama	Jumlah SDM PPID yang kompeten	Belum tersedianya anggaran	-	-	5 orang dalam 4 kegiatan	200,000,000	5 Orang dalam 4 kegiatan	220,000,000	5 Orang dalam 4 kegiatan	242,000,000	5 orang dalam 4 kegiatan	266,200,000	5 orang dalam 4 kegiatan	928,200,000



			Sosialisasi LAPORI-SP4N	Persentase pengaduan publik melalui aplikasi LAPOR	100 Pengaduan	100 Pengaduan	150,000,000	200 pengaduan	300,000,000	200 Pengaduan	330,000,000	200 Pengaduan	363,000,000	200 Pengaduan	399,300,000	200 Pengaduan	1,542,300,000
			Peningkatan Kapasitas Tim Pengelola LAPORI-SP4N	Jumlah SDM pengelola Lapor SP4N yang mengikuti Pelatihan	Belum tersedianya anggaran	-	-	20 orang	150,000,000	20 orang	165,000,000	20 orang	181,500,000	20 orang	199,650,000	20 orang	696,150,000
			Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik	Nilai hasil survey persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik	3 kab/kota	3 kab/kota	200,000,000	Survey	200,000,000	Survey	220,000,000	Survey	242,000,000	Survey	266,200,000	Survey	1,128,200,000
			Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Publik (SAIK) 2020	Persentase peserta yang mengikuti SAIK Dinas Kominfo Prov. Sumsel	1 Keg	1 Keg	150,000,000	1 Keg	150,000,000	1 Keg	165,000,000	1 Keg	181,500,000	1 Keg	199,650,000	1 Keg	846,150,000
			Press Conference (Konferensi Pers)	Frekuensi pelaksanaan Press Conference	10 kali	10 kali	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000
			Publikasi Informasi Daerah 2019	Jumlah Informasi melalui Poster, Leaflet dan Booklet, mengikuti pameran	1000 informasi	1000 informasi	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000
			Pelayanan Informasi Media Center	Jumlah informasi melalui media cetak, elektronik, dan online	100 cetakan	100 cetakan	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000
			Rekrutmen Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumsel	Jumlah Komisioner Komisi Informasi selama kurun waktu 2019-2023	5 orang	5 orang	605,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605,000,000
<b>2</b>	<b>Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya TIK</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Sistem dan Layanan Komunikasi dan Informasi</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi Publik</b>	<b>Cakupan pengembangan dan pemberdayaan informasi dan komunikasi masyarakat/publik</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>	<b>2,538,600,000</b>	<b>80%</b>	<b>2,025,000,000</b>	<b>85%</b>	<b>2,276,230,000</b>	<b>95%</b>	<b>2,503,853,000</b>	<b>100%</b>	<b>2,754,238,300</b>	<b>100%</b>	<b>12,097,921,300</b>
			Bimbingan Teknis Kehumasan Prov. Sumsel	Jumlah Bimtek Kehumasan Se Prov. Sumsel	100 Orang	100 Orang	75,000,000	100 orang	100,000,000	100 Orang	110,000,000	100 Orang	121,000,000	100 Orang	133,100,000	100 Orang	539,100,000
			Rakorda BAKOHUMAS Prov. Sumsel	Jumlah Rakorda Bakohumas Prov. sumsel yang terselenggara	100 Orang	100 Orang	100,000,000	100 orang	100,000,000	100 orang	110,000,000	100 orang	121,000,000	100 Orang	133,100,000	100 Orang	564,100,000

			Temu BAKOHUMAS Se Indonesia	Jumlah Kegiatan Temu Bako humas Tingkat Nasional	Seluruh bako humas seIndonesia	1 kali	106,200,000	Seluruh bako humas seIndonesia	150,000,000	Seluruh bako humas SeIndonesia	165,000,000	Seluruh bako humas SeIndonesia	181,500,000	Seluruh bako humas seIndonesia	199,650,000	Seluruh bako humas seIndonesia	802,350,000
			Literasi Pengguna Media Sosial	Jumlah Pengguna Media Sosial yang dapat mengelola dengan bijak	Belum tersedianya anggaran	-	-	7 Kali	186,500,000	7 Kali	205,150,000	7 Kali	225,665,000	7 Kali	248,231,500	7 Kali	865,546,500
			Transfer Penyampaian Informasi melalui Media Pesan Singkat	Jumlah penyampaian informasi ke masyarakat melalui media pesan singkat secara massal	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	300,000,000	17 kab/kota	200,000,000	17 Kab/kota	220,000,000	17 Kab/kota	242,000,000	17 Kab/kota	266,200,000	17 Kab/kota	1,228,200,000
			Forum Diskusi Bersama Bidang IT	Jumlah Diskusi Bersama Bidang IT	1 Kali	1 Kali	96,400,000	1 kali	100,000,000	1 Kali	110,000,000	1 Kali	121,000,000	1 Kali	133,100,000	1 Kali	560,500,000
			Temu Netizen	Jumlah pertemuan antar netizen	3 kali	3 kali	75,000,000	3 kali	75,000,000	3 Kali	82,500,000	3 Kali	90,750,000	3 kali	99,825,000	3 kali	423,075,000
			Operasional radio streaming	Jumlah Siaran Publikasi	Belum tersedianya anggaran	-	-	1 Tahun	463,500,000	1 Tahun	509,850,000	1 Tahun	560,835,000	1 Tahun	616,918,500	1 Tahun	2,151,103,500
			Pameran Hari Pers Tingkat Nasional	Jumlah partisipasi hari pers nasional	Belum tersedianya anggaran	-	-	1 Keg	150,000,000	1 Kegiatan	165,000,000	1 Kegiatan	181,500,000	1 Keg	199,650,000	1 Keg	696,150,000
			Press Conference (Konferensi Pers)	Frekuensi pelaksanaan Press Conference	Belum tersedianya anggaran	-	-	1 Tahun	150,000,000	1 Tahun	165,000,000	1 Tahun	181,500,000	1 Tahun	199,650,000	1 Tahun	696,150,000
			Pelayanan Informasi Media Center	Jumlah berita yang diupload di situs resmi Pemprov. Sumsel	Belum tersedianya anggaran	-	-	1 Tahun	150,000,000	1 tahun	165,000,000	1 tahun	181,500,000	1 tahun	199,650,000	1 tahun	696,150,000
			Peliputan Kegiatan Pemprov. Sumsel	Jumlah berita yang diupload di situs resmi Pemprov. Sumsel	Belum tersedianya anggaran	-	-	1 Tahun	200,000,000	-	-	-	-	-	-	1 tahun	200,000,000
			Pengelolaan Informasi melalui Media Sosial	Jumlah informasi media sosial yang dikelola	12 kali	12 kali	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	12 kali	200,000,000
			Percepatan Pembentukan Bako humas	Jumlah pembentukan Bako humas Kab/Kota se Sumsel	1 keg	1 keg	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 keg	100,000,000
			Iklan Layanan Masyarakat Melalui Media Elektronik	Jumlah Produksi dan Penayangan ILM di Media Elektronik dan Cetak Nasional dan Lokal	1 paket	1 paket	240,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	240,000,000



**RENSTRA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
2019-2023**

			Detail Engineering Design Studio Mini	Jumlah detail engineering design studio mini	1 unit	1 unit	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	100,000,000	
			Layanan Studio / Radio Streaming untuk Publikasi	Jumlah Siaran Langsung	1 keg	1 keg	541,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1 keg	541,000,000	
			Pembuatan Jingle Lagu	Lagu Jingle Indonesia Raya dan Padamu Negeri	2 lagu (indonesia raya dan bagimu negeri)	2 lagu (indonesia raya dan bagimu negeri)	105,000,000	-	-	-	-	-	-	-	2 lagu (indonesia raya dan bagimu negeri)	105,000,000	
			Publikasi Media Cetak dan Media Elektronik	Jumlah Dokumentasi dan Publikasi yang dipublikasikan kominfo	1 Keg	1 Keg	500,000,000	-	-	1 Keg	268.730,000	1 Keg	295,603,000	1 Keg	325,163,300	1 Keg	1,389,496,300
<b>3</b>	<b>Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan melalui e-government</b>	<b>Meningkatnya Pemanfaatan Aplikasi e-government yang terintegrasi</b>	<b>Program Pelayanan E-government</b>	<b>Persentase pengguna layanan berbasis E-Government (pelayanan publik/pemerintah)</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>830,000,000</b>	<b>70%</b>	<b>2,400,000,000</b>	<b>80%</b>	<b>2,805,000,000</b>	<b>90%</b>	<b>3,085,500,000</b>	<b>100%</b>	<b>3,394,050,000</b>	<b>100%</b>	<b>12,514,550,000</b>
			Pengembangan, Pelayanan dan Pemeliharaan Domain dan Subdomain	Jumlah domain dan Subdomain website Pemprov. Sumsel	1 web portal, 2 subdomain, 1 aplikasi	1 web portal, 2 subdomain, 1 aplikasi	100,000,000	1 web portal, 2 subdomain, 1 aplikasi	200,000,000	1 Web Portal, 2 Subdomain, 1 Aplikasi	220,000,000	1 Web Portal, 2 Subdomain, 1 Aplikasi	242,000,000	1 Web Portal, 2 Subdomain, 1 Aplikasi	266,200,000	1 Web Portal, 2 Subdomain, 1 Aplikasi	1,028,200,000
			Penyelenggaraan dan Pengembangan Ekosistem TIK Smart Provinsi	Jumlah SDM yang menguasai TIK	100 orang	100 orang	169,000,000	100 orang	100,000,000	100 Orang	110,000,000	100 Orang	121,000,000	100 orang	133,100,000	100 orang	633,100,000
			Operasional, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelayanan Command Center dan CCTV	Jumlah aplikasi layanan publik yang tersedia	1 aplikasi	1 aplikasi	185,000,000	4 aplikasi	800,000,000	4 Aplikasi	880,000,000	4 Aplikasi	968,000,000	4 Aplikasi	1,064,800,000	4 Aplikasi	3,897,800,000
			Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah OPD yang menggunakan TIK	50 OPD	50 OPD	315,000,000	50 OPD	200,000,000	50 OPD	220,000,000	50 OPD	242,000,000	50 OPD	266,200,000	50 OPD	1,243,200,000
			Inkubator Teknologi Informatika	Jumlah SDM yang berkualitas	Belum tersedianya anggaran	-	-	-	-	300 orang	165,000,000	300 orang	181,500,000	300 orang	199,650,000	300 orang	546,150,000
			Literasi digital untuk UMKM, Nelayan, dan Petani	Jumlah startup yang terbentuk	Belum tersedianya anggaran	-	-	5 Startup	200,000,000	5 Starup	220,000,000	5 Starup	242,000,000	5 Startup	266,200,000	5 Startup	928,200,000
			Dokumen master plan SPBE	Jumlah dokumen masterplan yang tersedia	Belum tersedianya anggaran	-	-	1 dokumen	100,000,000	1 Dokumen	110,000,000	1 Dokumen	121,000,000	1 Dokumen	133,100,000	1 Dokumen	464,100,000



**RENSTRA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
2019-2023**

			Pekan TIK Milenial Sumsel	Jumlah Kegiatan yang diadakan/ dilaksanakan	Belum tersedianya anggaran	-	-	5 kegiatan	800,000,000	5 kegiatan	880,000,000	5 kegiatan	968,000,000	5 kegiatan	1,064,800,000	5 kegiatan	3,712,800,000
			Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Jumlah Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 layanan	1 layanan	61,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 layanan	61,000,000
<b>4</b>	<b>Meningkatkan ketersediaan infrastruktur Kominfo sampai pedalaman dan perbatasan</b>	<b>Meningkatnya jumlah wilayah yang terkoneksi dan dapat mengakses layanan TIK</b>	<b>Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>	<b>Persentase pengembangan infrastruktur TIK</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>9,889,200,000</b>	<b>93</b>	<b>12,150,000,000</b>	<b>94</b>	<b>16,580,000,000</b>	<b>97</b>	<b>23,078,000,000</b>	<b>100</b>	<b>25,385,800,000</b>	<b>100</b>	<b>87,083,000,000</b>
			Penyediaan Bandwith Intranet dan Internet	Jumlah layanan bandwith secara elektronik	300 Mbps	300 Mbps	3,500,000,000	300 Mbps	3,500,000,000	300 Mbps	3,850,000,000	300 Mbps	4,235,000,000	300 Mbps	4,658,500,000	300 Mbps	19,743,500,000
			Inkubator Teknologi Informatika	Jumlah SDM yang berkualitas	50 orang	50 orang	150,000,000	300 orang	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Audit TIK	Jumlah Audit	Belum tersedianya anggaran	-	-	50 OPD	50,000,000	50 OPD	55,000,000	50 OPD	60,500,000	50 OPD	66,550,000	50 OPD	232,050,000
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi bagi Masyarakat di Sumatera Selatan	Jumlah jaringan internet desa	170 website dan 34 jaringan internet desa	170 website dan 34 jaringan internet desa	2,795,600,000	51 Desa terkoneksi jaringan internet	4,250,000,000	68 Desa terkoneksi jaringan internet	4,675,000,000	85 Desa terkoneksi jaringan internet	5,142,500,000	102 Desa Terkoneksi jaringan internet	5,656,750,000	102 Desa Terkoneksi jaringan internet	22,519,850,000
			DED Perencanaan Infrastruktur Jaringan Internet Pemprov (Master Plan)	Jumlah dokumen masterplan yang tersedia	Belum tersedianya anggaran	-	-	1 Keg	200,000,000	-	-	-	-	-	-	1 Keg	200,000,000
			Pemeliharaan dan Pengembangan Data Center	Jumlah data center yang tersedia	1 command center dan CCTV	1 command center dan CCTV	696,600,000	1 Data Center	4,000,000,000	-	-	1 Data Center	4,840,000,000	1 Data Center	5,324,000,000	1 Data Center	14,860,600,000
			Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet / Intranet, Data Center dan CCTV	Jumlah jaringan yang tersedia	50 OPD	50 OPD	2,747,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50 OPD	2,747,000,000
			Pengembangan Jaringan Fiber Optik antar OPD Pemprov. Sumsel	Jumlah OPD yang terjaringan Fiber Optik	Belum tersedianya anggaran	-	-	-	-	50 OPD	8,000,000,000	50 OPD	8,800,000,000	50 OPD	9,680,000,000	50 OPD	26,480,000,000

5	Tersedianya data statistik sektoral yang terintegrasi dan akurat secara online	Meningkatkan kualitas layanan data statistik sektoral	Program Pengembangan Statistik	Persentase data yang tersedia	45%	45%	750,000,000	60%	1,750,000,000	70%	1,925,000,000	90%	2,117,500,000	100%	2,329,250,000	100%	8,871,750,000
			Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Jumlah data perangkat daerah yang berkualitas	1 dokumen	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 Dokumen	220,000,000	1 Dokumen	242,000,000	1 Dokumen	266,200,000	1 Dokumen	1,078,200,000
			Dukungan Sumsel Satu Data Sumsel	Jumlah sumsel satu data	Belum tersedianya anggaran	-	-	1 dokumen	500,000,000	1 dokumen	550,000,000	1 dokumen	605,000,000	1 dokumen	665,500,000	1 dokumen	2,320,500,000
			Pengolahan Data Statistik Sektoral	Jumlah data yang terolah dengan baik	Belum tersedianya anggaran	-	-	1 dokumen	150,000,000	1 Dokumen	165,000,000	1 Dokumen	181,500,000	1 dokumen	199,650,000	1 dokumen	696,150,000
			Analisa Data Statistik Sektoral	Jumlah analisa data statistik sektoral	1 dokumen	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	150,000,000	1 Dokumen	165,000,000	1 Dokumen	181,500,000	1 dokumen	199,650,000	1 dokumen	846,150,000
			Sosialisasi Statistik Sektoral	Jumlah kab/kota yang terbina	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	150,000,000	17 kab/kota	150,000,000	17 kab/kota	165,000,000	17 kab/kota	181,500,000	17 Kab/Kota	199,650,000	17 Kab/Kota	846,150,000
			Survey Statistik Sektoral	Indeks Survei statistik	Belum tersedianya anggaran	-	-	1 dokumen	150,000,000	1 Dokumen	165,000,000	1 Dokumen	181,500,000	1 dokumen	199,650,000	1 dokumen	696,150,000
			Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata yang tersedia	Belum tersedianya anggaran	-	-	1 dokumen	100,000,000	1 Dokumen	110,000,000	1 Dokumen	121,000,000	1 dokumen	133,100,000	1 dokumen	464,100,000
			Diseminasi Statistik Sektoral	Jumlah penyebarluasan hasil statistik sektoral	Belum tersedianya anggaran	-	-	200 Orang	200,000,000	200 Orang	220,000,000	200 Orang	242,000,000	200 Orang	266,200,000	200 Orang	928,200,000
			Monitoring dan Evaluasi Statistik	Jumlah kab/kota yang terbina	17 kab/kota	17 kab/kota	150,000,000	17 kab/kota	100,000,000	17 kab/kota	110,000,000	17 kab/kota	121,000,000	17 kab/kota	133,100,000	17 kab/kota	614,100,000
			Supervisi Statistik Sektoral ke kab/Kota	Jumlah kab/kota yang terbina	Belum tersedianya anggaran	-	-	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	55,000,000	1 dokumen	60,500,000	1 dokumen	66,550,000	1 dokumen	232,050,000
			Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Statistik	Jumlah SDM Bidang Statistik	50 orang	50 orang	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000,000
6	Meningkatkan kinerja pelayanan persandian dan pemanfaatan sistem informasi	Mewujudkan sistem keamanan informasi berklasifikasi milik pmda yang utuh, otentik, berintegrasi dan tidak dapat disangkal	Program Pengembangan Persandian, Siber, dan Keamanan Informasi	Persentase penyelenggaraan pengamanan informasi	70%	70%	200,000,000	80%	800,000,000	90%	880,000,000	95%	968,000,000	100%	1,064,800,000	100%	3,912,800,000



			Standarisasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 270001	Jumlah pengelolaan sistem pengamanan informasi	Belum tersedianya anggaran	-	-	500,000,000	50 OPD	550,000,000	50 OPD	605,000,000	50 OPD	665,500,000	50 OPD	2,320,500,000	
			Operasional Informasi Berklasifikasi	Jumlah informasi yang dikelola/ amankan	Belum tersedianya anggaran	-	-	100,000,000	17 kab/kota	110,000,000	17 kab/kota	121,000,000	17 kab/kota	133,100,000	17 kab/kota	464,100,000	
			Operasional Alat Persandian	Jumlah Peralatan Persandian , APU , Aplikasi persandian yang digunakan	Belum tersedianya anggaran	-	-	100,000,000	1 set palsan/APU	110,000,000	1 set Palsan / APU	121,000,000	1 set Palsan / APU	133,100,000	1 set Palsan / APU	464,100,000	
			Workshop Peningkatan Layanan Persandian (SE, JT Assesment dan Kesadaran Informasi) Bagi Aparatur Pemerintah Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Workshop	Belum tersedianya anggaran	-	-	100,000,000	75 orang	110,000,000	100 Orang	121,000,000	100 Orang	133,100,000	100 Orang	464,100,000	
			Pemeliharaan Alat Persandian	Jumlah peralatan persandian, APU, Aplikasi persandian yang digunakan	1 Set	1 Set	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000	
			Keamanan Informasi Berklasifikasi Pemerintah Daerah	Jumlah UTP Kab/Kota operasional yang sesuai SOP	17 kab/kota	17 kab/kota	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000	
<b>7</b>	<b>Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan melalui e-government</b>	<b>Modernisasi layanan administrasi perkantoran</b>	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Persentase (%) kebutuhan administrasi perkantoran terpenuhi</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>4,014,087,275</b>	<b>92%</b>	<b>5,051,568,172</b>	<b>94%</b>	<b>5,287,994,989</b>	<b>96%</b>	<b>5,816,794,488</b>	<b>100%</b>	<b>6,398,473,937</b>	<b>100%</b>	<b>26,568,918,861</b>
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang terkirim	100 surat	100 surat	20,000,000	125 surat	20,000,000	125 Surat	22,000,000	125 Surat	24,200,000	125 surat	26,620,000	125 surat	112,820,000
			Penyediaan Komunikasi, SDA dan Listrik	Jumlah pembiayaan komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	341,137,272	12 bulan	600,000,000	12 Bulan	660,000,000	12 Bulan	726,000,000	12 Bulan	798,600,000	12 Bulan	3,125,737,272
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan R4/R2	11 kendaraan R4/R2	11 kendaraan R4/R2	385,900,000	11 kendaraan R4/R2	500,000,000	12 Kendaraan R4/R2	550,000,000	13 Kendaraan R4/R2	605,000,000	14 Kendaraan R4/R2	665,500,000	14 Kendaraan R4/R2	2,706,400,000



**RENSTRA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
2019-2023**

			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga admistrasi keuangan	10 orang	10 orang	39,900,000	10 orang	50,000,000	10 Orang	55,000,000	10 Orang	60,500,000	10 Orang	66,550,000	10 Orang	271,950,000
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kerja kebersihan kantor	4 orang	4 orang	146,000,003	5 orang	160,000,000	5 Orang	176,000,000	5 Orang	193,600,000	5 Orang	212,960,000	5 Orang	888,560,003
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bidang yang membutuhkan ATK	6 bidang	6 bidang	125,100,000	6 bidang	150,000,000	6 Bidang	165,000,000	6 Bidang	181,500,000	6 Bidang	199,650,000	6 Bidang	821,250,000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bidang yang membutuhkan barang cetak dan penggandaan	6 bidang	6 bidang	100,000,000	6 bidang	125,000,000	6 Bidang	137,500,000	6 Bidang	151,250,000	6 Bidang	166,375,000	6 Bidang	680,125,000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan	1 Tahun	1 Tahun	35,000,000	1 Tahun	34,968,172	1 Tahun	38,464,989	1 Tahun	42,311,488	1 Tahun	46,542,637	1 Tahun	197,287,286
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20 dokumen	20 dokumen	56,600,000	30 dokumen	100,000,000	30 dokumen	110,000,000	30 dokumen	121,000,000	30 dokumen	133,100,000	30 dokumen	520,700,000
			Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah makan dan minum	100 kali	100 kali	150,000,000	100 kali	150,000,000	120 kali	165,000,000	140 kali	181,500,000	160 kali	199,650,000	160 kali	846,150,000
			Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Jumlah tenaga kerja tidak tetap	45 orang tenaga tidak tetap	45 orang tenaga tidak tetap	1,436,250,000	58 orang Tenaga Tidak Tetap	1,864,100,000	58 orang Tenaga Tidak Tetap	2,050,510,000	58 orang Tenaga Tidak Tetap	2,255,561,000	58 orang Tenaga Tidak Tetap	2,481,117,100	58 orang Tenaga Tidak Tetap	10,087,538,100
			Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih	Jumlah bidang yang mendapatkan peralatan dan bahan pembersih	6 bidang	6 bidang	40,000,000	6 bidang	40,000,000	6 Bidang	44,000,000	6 Bidang	48,400,000	6 bidang	53,240,000	6 bidang	225,640,000
			Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri	Jumlah Koordinasi dan konsultasi ke dalam, luar daerah dan luar negeri	12 bulan	12 bulan	1,100,000,000	12 bulan	900,000,000	12 Bulan	990,000,000	12 Bulan	1,089,000,000	12 Bulan	1,197,900,000	12 Bulan	5,276,900,000
			Penyediaan Jasa Tutor SKJ	Jumlah mengadakan senam	1 orang	1 orang	13,200,000	1 orang	13,200,000	1 orang	14,520,000	1 orang	15,972,000	1 orang	17,569,200	1 orang	74,461,200
			Festival/Expo Sumsel	Jumlah Festival yang terselenggara	Belum tersedianya anggaran	-	-	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	110,000,000	1 Kegiatan	121,000,000	1 Kegiatan	133,100,000	1 Kegiatan	464,100,000



			Publikasi melalui media elektronik	Jumlah Dokumentasi dan Publikasi yang dipublikasikan kominfo	Belum tersedianya anggaran	-	-	1 Kegiatan	244,300,000	-	-	-	-	-	-	-	244,300,000
			Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi	Jumlah Dokumentasi dan Publikasi	5 dokumentasi	5 dokumentasi	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000,000
			<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persentase (%) kebutuhan sarana dan prasarana aparatur penunjang operasional aparatur terpenuhi</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>1,807,500,000</b>	<b>90%</b>	<b>2,340,000,000</b>	<b>95%</b>	<b>2,574,000,000</b>	<b>98%</b>	<b>2,831,400,000</b>	<b>100%</b>	<b>3,114,540,000</b>	<b>100%</b>	<b>12,667,440,000</b>
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor	1 paket	1 paket	550,400,000	1 paket	400,000,000	1 Paket	440,000,000	1 Paket	484,000,000	1 Paket	532,400,000	1 Paket	2,406,800,000
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan / perlengkapan kantor pada bidang	1 keg	1 keg	100,000,000	1 keg	200,000,000	1 Kegiatan	220,000,000	1 Kegiatan	242,000,000	1 Kegiatan	266,200,000	1 Kegiatan	1,028,200,000
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 gedung kantor	1 gedung kantor	150,000,000	1 gedung kantor	140,000,000	1 Gedung kantor	154,000,000	1 Gedung kantor	169,400,000	1 Gedung kantor	186,340,000	1 Gedung kantor	799,740,000
			Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	Belum tersedianya anggaran	-	-	1 buah mobil	500,000,000	1 Buah Mobil	550,000,000	1 Buah Mobil	605,000,000	1 Buah Mobil	665,500,000	1 Buah Mobil	2,320,500,000
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Media Publikasi	Jumlah Tiang Baliho yang dipelihara	1 paket	1 paket	200,000,000	1 paket	200,000,000	1 Paket	220,000,000	1 Paket	242,000,000	1 Paket	266,200,000	1 Paket	1,128,200,000
			Pengadaan Sarana Media Publikasi	Jumlah Tiang Baliho yang dibuat	4 Titik	4 Titik	807,100,000	4 titik	900,000,000	4 Titik	990,000,000	4 Titik	1,089,000,000	4 Titik	1,197,900,000	4 Titik	4,984,000,000
<b>9</b>			<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Persentase sumber daya aparatur terpenuhi</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>370,900,000</b>	<b>96%</b>	<b>570,000,000</b>	<b>97%</b>	<b>275,000,000</b>	<b>98%</b>	<b>387,200,000</b>	<b>100%</b>	<b>425,920,000</b>	<b>100%</b>	<b>2,029,020,000</b>
			Diklat ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	10 Orang	10 Orang	150,000,000	10 Orang	250,000,000	11 Orang	275,000,000	12 Orang	302,500,000	13 orang	332,750,000	13 orang	1,310,250,000
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	30 orang	30 orang	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30 orang	100,000,000

			Benchmarking Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (DID Kinerja Perencanaan Terbaik)	Jumlah Aparatur yang mengikuti Benchmarking	3 orang	3 orang	30,750,000	-	-	-	-	-	-	-	3 orang	30,750,000	
			Capacity Building SDM Aparatur Bidang Perencanaan (DID Kinerja Perencanaan Terbaik)	Jumlah Aparatur yang mengikuti Capacity Building	3 orang	3 orang	40,700,000	-	-	-	-	-	-	-	3 orang	40,700,000	
			Benchmarking Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP dengan Nilai A)	Jumlah Aparatur yang mengikuti Benchmarking	3 orang	3 orang	25,750,000	-	-	-	-	-	-	-	3 orang	25,750,000	
			Bimbingan Teknis SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP dengan Nilai A)	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis SAKIP	3 orang	3 orang	23,700,000	-	-	-	-	-	-	-	3 orang	23,700,000	
			Penyusunan Lakip Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP)	Jumlah peserta yang mengikuti penyusunan lakip	Belum tersedianya anggaran	-	-	3 orang	35,000,000	-	-	3 orang	42,350,000	3 orang	46,585,000	3 orang	123,935,000
			Pembinaan SAKIP Perangkat Daerah (DID kinerja SAKIP)	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan sakip	Belum tersedianya anggaran	-	-	3 orang	35,000,000	-	-	3 orang	42,350,000	3 orang	46,585,000	3 orang	123,935,000
			Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang mengikuti pelatihan	Belum tersedianya anggaran	-	-	1 Keg	250,000,000	-	-	-	-	-	-	1 Keg	250,000,000
<b>10</b>			<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Jumlah dokumen pelaporan</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>294,600,000</b>	<b>85%</b>	<b>422,630,000</b>	<b>90%</b>	<b>431,893,000</b>	<b>95%</b>	<b>475,082,300</b>	<b>100%</b>	<b>522,590,530</b>	<b>100%</b>	<b>2,146,795,830</b>
			Diklat Perencaan (DID Kinerja SAKIP)	Jumlah staf Perencanaan yang mengikuti Diklat	Belum tersedianya anggaran	-	-	3 orang	30,000,000	-	-	-	-	-	-	3 orang	30,000,000
			Rapat Koordinasi Teknis Dinas Kominfo 2020	Jumlah Kegiatan Rapat Teknis Kominfo	1 kali	1 kali	69,405,000	1 kali	102,630,000	1 Kali	112,893,000	1 Kali	124,182,300	1 Kali	136,600,530	1 Kali	545,710,830



**RENSTRA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
2019-2023**

			Pengawasan Kegiatan Intrernal Dinas Kominfo (Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Perencanaan)	Jumlah Dokumen Hasil Capaian Kinerja	1 dokumen	1 dokumen	99,600,000	1 dokumen	90,000,000	1 dokumen	99,000,000	1 dokumen	108,900,000	1 dokumen	119,790,000	1 dokumen	517,290,000
			Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah rencana kerja	1 dokumen	1 dokumen	30,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 Dok	55,000,000	1 Dok	60,500,000	1 dokumen	66,550,000	1 dokumen	262,050,000
			PPID Pembantu (Kelembagaan)	Jumlah Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi milik Dinas	Belum tersedianya anggaran	-	-	1 dokumen	100,000,000	1 Dok	110,000,000	1 Dok	121,000,000	1 dokumen	133,100,000	1 dokumen	464,100,000
			Pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	Jumlah LKPJ yang sesuai dengan laporan akhir tahunan keuangan	1 dokumen	1 dokumen	30,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 Dok	55,000,000	1 Dok	60,500,000	1 dokumen	66,550,000	1 dokumen	262,050,000
			Penyusunan Profil Dinas Kominfo	Jumlah Profil	1 dokumen	1 dokumen	35,595,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	35,595,000
			Pembuatan Rencana Strategis Perangkat Daerah	Jumlah Renstra/RPJMD	1 dokumen	1 dokumen	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	30,000,000
<b>11</b>			<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Persentase meningkatnya disiplin aparatur</b>	<b>80%</b>		<b>-</b>	<b>80%</b>	<b>100,000,000</b>	<b>80%</b>	<b>110,000,000</b>	<b>80%</b>	<b>121,000,000</b>	<b>80%</b>	<b>133,100,000</b>	<b>80%</b>	<b>464,100,000</b>
			Penyediaan Pakaian Dinas serta Atribut	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	Belum tersedianya anggaran	-	-	1 paket	100,000,000	1 paket	110,000,000	1 paket	121,000,000	1 paket	133,100,000	1 paket	464,100,000

**Revisi Tabel 6.1 (TC-27)**

No	TUJUAN	SASARAN	PRGOGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
						TAHUN 1		TAHUN 2		TAHUN 3		TAHUN 4		TAHUN 5			
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya TIK	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Layanan Komunikasi dan Informasi	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota						80%	12,970,530,000	80%	12,039,500,000	100%	13,243,450,000	100%	38,253,480,000
			Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase informasi yang dikelola dan ditindaklanjuti						80%	12,970,530,000	80%	12,039,500,000	80%	13,243,450,000	80%	38,253,480,000
			Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase penerapan UU keterbukaan informasi melalui OPD						48 OPD	185,000,000	48 OPD	203,500,000	48 OPD	223,850,000	48 OPD	612,350,000
			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah ASN OPD yang mengikuti pelatihan manajemen pengelolaan opini dan aspirasi publik serta jumlah pelaksanaan monitoring ke kab/kota						Survey	175,000,000	48 OPD dan kab/Kota	192,500,000	48 OPD dan kab/Kota	211,750,000	48 OPD dan kab/Kota	579,250,000
			Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah pengaduan publik melalui aplikasi lapor						200 Pengaduan	355,000,000	200 pengaduan	390,500,000	200 pengaduan	429,550,000	200 pengaduan	1,175,050,000



**RENSTRA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
2019-2023**

			Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Publikasi Melalui media luar ruang					1 Tahun	7,119,000,000	1 Tahun	7,830,900,000	1 Tahun	8,613,990,000	1 Tahun	23,563,890,000
			Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Persentase terwujudnya pengembangan dan pemberdayaan kelompok masyarakat					100%	176,000,000	100%	193,600,000	100%	212,960,000	100%	582,560,000
			Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah sengketa informasi publik dan jumlah badan publik yang paham akan aktualisasi layanan informasi publik					70 Sengketa	1,200,000,000	70 Sengketa, 17 kab/kota, lebih kurang 200 badan publik	1,320,000,000	70 Sengketa, 17 kab/kota, lebih kurang 200 badan publik	1,452,000,000	70 Sengketa, 17 kab/kota, lebih kurang 200 badan publik	3,972,000,000
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Iklan Layanan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan					17 Kab/kota	240,000,000	1 Tahun	264,000,000	1 Tahun	290,400,000	1 Tahun	794,400,000
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Informasi melalui Siaran Radio Streaming dan SMS Blast					1 Tahun	490,000,000	1 Tahun	539,000,000	1 Tahun	592,900,000	1 Tahun	1,621,900,000
			Layanan Hubungan Media	Jumlah Penayangan Iklan Layanan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan					17 Kab/kota	520,000,000	1 Tahun	572,000,000	1 Tahun	629,200,000	1 Tahun	1,721,200,000
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Manusia yang paham akan bermedia					1 Tahun	115,000,000	1 Kali	126,500,000	1 Kali	139,150,000	1 Kali	380,650,000
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Informasi dan Publikasi melalui Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan					3 Dokumen	2,395,530,000	1 Tahun	407,000,000	1 Tahun	447,700,000	1 Tahun	3,250,230,000
2	Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan melalui e-government	Meningkatnya Pemanfaatan Aplikasi e-government yang terintegrasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase akses internet							87%					



				Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi					50%	195,000,000	50%	214,500,000	70%	235,950,000	70%	645,450,000
			Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase layanan pengguna berbasis e-government (Pelayanan Publik/ Pemerintah)					100%	195,000,000	100%	214,500,000	100%	235,950,000	100%	645,450,000
			Penatalaksanaan dan Pengawasan nama domain dan sub domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase domain dan Subdomain website pemprov. sumsel yang tersedia					1 Domain (Web Portal), 2 Subdomain, 1 Aplikasi	195,000,000	100%	214,500,000	100%	235,950,000	100 orang	645,450,000
3	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur Kominfo sampai pedalaman dan perbatasan	Meningkatnya jumlah wilayah yang terkoneksi dan dapat mengakses layanan TIK	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase akses internet					87%	8,313,000,000	87%	9,144,300,000	90%	10,058,730,000	90%	27,516,030,000
				Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi						50%	6,009,000,000	50%	6,609,900,000	70%	7,270,890,000	70%
			Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pengguna e-government					90%	14,322,000,000	90%	15,754,200,000	90%	17,329,620,000	90%	47,405,820,000
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah Data Center					1 Data Center	4,640,000,000	1 Data Center	5,104,000,000	1 Data Center	5,614,400,000	1 Data Center	15,358,400,000
			Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Kapasitas Layanan Bandwith Internet					600 Mbps	4,130,000,000	600 Mbps	4,543,000,000	600 Mbps	4,997,300,000	600 Mbps	13,670,300,000
			Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Jaringan Lokasi Internet dan Kapasitas Bandwith					68 lokasi dengan masing masing desa 5 Mbps	4,183,000,000	102 Lokasi Terkoneksi Jaringan Internet	4,601,300,000	170 Lokasi Terkoneksi Jaringan Internet	5,061,430,000	170 Lokasi Terkoneksi Jaringan Internet	13,845,730,000



			Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pengguna Command Center dan Layanan Data					1 Tahun	380,000,000	100%	418,000,000	100%	459,800,000	100%	1,257,800,000
			Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Persentase OPD dan aplikasi yang di monitoring dan evaluasi SPBE					48 OPD dan kab/kota, aplikasi	609,000,000	49 OPD dan kab/kota	669,900,000	49 OPD dan kab/kota	736,890,000	49 OPD dan kab/kota	2,015,790,000
			Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah SDM yang berkualitas					200 Orang	380,000,000	500 orang	418,000,000	500 orang	459,800,000	500 orang	1,257,800,000
4	Tersedianya data statistik sektoral yang terintegrasi dan akurat secara online	Meningkatkan kualitas layanan data statistik sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah					100%	528,000,000	100%	580,800,000	100%	638,880,000		1,747,680,000
				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah					100%	84,000,000	100%	92,400,000	100%	101,640,000		278,040,000
			Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase data yang tersedia					100%	612,000,000	100%	673,200,000	100%	740,520,000	1 Dokumen	2,025,720,000
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PAD Diskominfo					1 Dokumen	84,000,000	1 Dokumen	92,400,000	1 Dokumen	101,640,000	1 dokumen	278,040,000
			Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Dokumen/ Aplikasi Satu Data Sumatera Selatan					1 Dokumen/ Aplikasi	268,000,000	1 Dokumen	294,800,000	1 Dokumen	324,280,000	1 dokumen	887,080,000
			Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Kab/Kota yang terbina					17 Kab/Kota/ Kota	55,000,000	17 Kab/Kota	60,500,000	17 Kab/Kota	66,550,000	1 dokumen	182,050,000



**RESTRAS DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
2019-2023**

			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Data perangkat daerah yang berkualitas					1 Dokumen	205,000,000	1 Dokumen	225,500,000	1 Dokumen	248,050,000	1 Dokumen	678,550,000
6	Meningkatkan kinerja pelayanan persandian dan pemanfaatan sistem informasi	Mewujudkan sistem keamanan informasi berklasifikasi milik penda yang utuh, otentik, berintegrasi dan tidak dapat disangkal	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah					100%	189,000,000	100%	207,900,000	100%	228,690,000	100%	625,590,000
			Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi					1 Keg	120,000,000	1 Keg	100,000,000	1 Keg	214,500,000	1 Keg	434,500,000
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Daerah	Jumlah Layanan Keamanan Informasi CSIRT					1 Keg	120,000,000	1 Tahun	100,000,000	1 Tahun	110,000,000	1 Tahun	330,000,000
			Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi							1 Tahun	95,000,000	1 Tahun	104,500,000	1 Tahun	199,500,000
			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah koordinasi persandian di daerah					17 kab/kota	69,000,000	17 kab/kota	107,900,000	17 kab/kota	118,690,000	17 kab/kota	295,590,000
			Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Teknis Persandian Kab/ Kota Penyelenggaraan Pengamanan Persandian sesuai dengan SOP					17 kab/kota	69,000,000	17 kab/kota	107,900,000	17 kab/kota	118,690,000	17 kab/kota	295,590,000
7	Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan melalui e-government	Modernisasi administrasi perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran terpenuhi					90%	17,220,822,000	90%	18,140,522,000	90%	19,954,574,200	90%	55,315,918,200
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan					1 Dok	173,282,000	1 Dok	190,610,200	1 Dok	209,671,220	1 Dok	573,563,420



**RENSTRA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
2019-2023**

			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah rencana kerja					1 Dokumen	43,282,000	1 Dok	70,610,200	1 Dok	77,671,220	1 Dok	191,563,420
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Teknis Kominfo					1 Kali	130,000,000	1 Kali	120,000,000	1 Kali	132,000,000	1 Kali	382,000,000
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah tenaga administrasi keuangan					10 orang	10,129,422,000	10 orang	10,173,982,000	10 orang	11,191,380,200	10 orang	31,494,784,200
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenaga ASN					1 Tahun	10,083,822,000	1 Tahun	10,083,822,000	1 Tahun	11,092,204,200	1 Tahun	31,259,848,200
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tenaga admnistrasi keuangan					10 Orang	45,600,000	10 orang	90,160,000	10 orang	99,176,000	10 orang	234,936,000
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Aset Dinas Kominfo yang di asuransikan					1 Tahun	70,000,000	1 Tahun	77,000,000	1 Tahun	84,700,000	1 Tahun	231,700,000
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah aset dinas kominfo yang diasuransikan					1 Tahun	70,000,000	1 Tahun	77,000,000	1 Tahun	84,700,000	1 Tahun	231,700,000
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat					1 Tahun	100,000,000	1 Tahun	110,000,000	1 Tahun	121,000,000	1 Tahun	331,000,000
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat					1 Tahun	100,000,000	1 Tahun	110,000,000	1 Tahun	121,000,000	1 Tahun	331,000,000
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran terpenuhi					1 Tahun	1,425,788,000	1 Tahun	1,528,366,800	1 Tahun	1,681,203,480	1 Tahun	4,635,358,280
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					6 Bidang	39,000,000	1 Tahun	42,900,000	6 Bidang	47,190,000	6 Bidang	129,090,000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemeruhan alat tulis kantor					6 Bidang	150,000,000	1 Tahun	165,000,000	6 Bidang	181,500,000	6 Bidang	496,500,000
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bidang yang mendapatkan peralatan kebersihan dan bahan pembersih					6 Bidang	63,220,000	1 Tahun	69,542,000	6 Bidang	76,496,200	6 Bidang	209,258,200



**RENSTRA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
2019-2023**

			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan dan minum					7816 Kotak	99,968,000	1 Tahun	109,964,800	1 Tahun	120,961,280	1 Tahun	330,894,080
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum					48 Kali	53,600,000	1 Tahun	58,960,000	1 Tahun	64,856,000	1 Tahun	177,416,000
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bidang yang membutuhkan cetakan dan penggandaan					6 Bidang	100,000,000	1 Tahun	110,000,000	6 Bidang	121,000,000	6 Bidang	331,000,000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					11080 eksemplar	100,000,000	1 Tahun	110,000,000	1 Tahun	121,000,000	1 Tahun	331,000,000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat-rapat					200 kali	750,000,000	1 Tahun	785,000,000	1 Tahun	863,500,000	1 Tahun	2,398,500,000
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pengelolaan Informasi dan Domentasi Milik Dinas					1 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	77,000,000	1 Dokumen	84,700,000	1 Dokumen	231,700,000
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang administrasi kebutuhan terpenuhi					1 Tahun	3,567,900,000	1 Tahun	3,924,690,000	1 Tahun	4,317,159,000	1 Tahun	11,809,749,000
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat					1 Tahun	20,000,000	1 Tahun	22,000,000	1 Tahun	24,200,000	1 Tahun	66,200,000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayar					12 Bulan	500,000,000	1 Tahun	550,000,000	1 Tahun	605,000,000	1 Tahun	1,655,000,000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja kebersihan kantor, Jumlah mengadakan senam, Jumlah tenaga kerja tidak tetap					78 Orang tenaga tidak tetap	3,047,900,000	1 Tahun	3,352,690,000	1 Tahun	3,687,959,000	1 Tahun	10,088,549,000
9			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan aset BMD					1 Tahun	937,430,000	1 Tahun	1,031,173,000	1 Tahun	1,134,290,300	1 Tahun	3,102,893,300



**RENSTRA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
2019-2023**

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional					18 unit (16 Mobil dan 2 Motor)	557,430,000	20 unit (18 Mobil dan 2 Motor)	613,173,000	20 unit (18 Mobil dan 2 Motor)	674,490,300	20 unit (18 Mobil dan 2 Motor)	1,845,093,300
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan/ perlengkapan kantor					1 Keg	100,000,000	1 Tahun	110,000,000	1 Tahun	121,000,000	1 Tahun	331,000,000
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah tiang baliho yang terpelihara					1 Paket	100,000,000	1 Tahun	110,000,000	1 Paket	121,000,000	1 Paket	331,000,000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor					1 Gedung Kantor	180,000,000	1 Gedung Kantor	198,000,000	1 Gedung Kantor	217,800,000	1 Gedung Kantor	595,800,000
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan aset BMD					1 Tahun	817,000,000	1 Tahun	1,104,700,000	1 Tahun	1,215,170,000	1 Tahun	3,136,870,000
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas					3 Mobli	600,000,000	2 Mobil	660,000,000	2 Mobil	726,000,000	2 Mobil	1,986,000,000
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Dinas Kominfo							1 Tahun	206,000,000	1 Tahun	226,600,000	1 Tahun	432,600,000
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin					1 Tahun	217,000,000	1 Tahun	238,700,000	1 Paket	262,570,000	1 Paket	718,270,000

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2023**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			2021		2022		2023		Target Kinerja	Target Anggaran (Rp Juta)
			Target Kinerja	Target Anggaran (Rp Juta)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp Juta)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp Juta)		
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran terpenuhi	%	90%	15,560,468,319	90%	16,525,866,000	90%	18,178,452,600	90%	50,264,786,919
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan	Dokumen	1 Dokumen	130,282,000	1 Dokumen	185,000,000	1 Dokumen	203,500,000	1 Dokumen	518,782,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah rencana kerja	Dokumen	1 Dokumen	43,282,000	1 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	77,000,000	1 Dokumen	190,282,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Teknis Kominfo	Kali	1 Kali	87,000,000	1 Kali	115,000,000	1 Kali	126,500,000	1 Kali	328,500,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Tahun	1 Tahun	7,622,790,000	1 Tahun	9,486,043,000	1 Tahun	10,434,647,300	1 Tahun	27,543,480,300
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenaga ASN	Tahun	1 Tahun	7,577,190,000	1 Tahun	9,320,443,000	1 Tahun	10,252,487,300	1 Tahun	27,150,120,300
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tenaga administrasi	Orang, Tahun	10 Orang	45,600,000	1 Tahun	165,600,000	1 Tahun	182,160,000	1 Tahun	393,360,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Aset Dinas Kominfo yang di asuransikan	Tahun	1 Tahun	21,920,000	1 Tahun	50,000,000	1 Tahun	55,000,000	1 Tahun	126,920,000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah aset dinas kominfo yang diasuransikan	Tahun	1 Tahun	21,920,000	1 Tahun	50,000,000	1 Tahun	55,000,000	1 Tahun	126,920,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	Tahun	1 Tahun	190,000,000	1 Tahun	110,000,000	1 Tahun	271,000,000	1 Tahun	571,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	Tahun					1 Tahun	150,000,000	1 Tahun	150,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	Tahun	1 Tahun	190,000,000	1 Tahun	110,000,000	1 Tahun	121,000,000	1 Tahun	421,000,000



Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran terpenuhi	Tahun	1 Tahun	1,577,501,420	1 Tahun	1,497,960,000	1 Tahun	1,647,756,000	1 Tahun	4,723,217,420
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bidang, Tahun	6 Bidang	39,000,000	1 Tahun	40,000,000	1 Tahun	44,000,000	1 Tahun	123,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan alat tulis kantor	Bidang, Tahun	6 Bidang	150,000,000	1 Tahun	150,000,000	1 Tahun	165,000,000	1 Tahun	465,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pemenuhan kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Bidang, Tahun	6 Bidang	63,220,000	1 Tahun	70,000,000	1 Tahun	77,000,000	1 Tahun	210,220,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan dan minum	Kotak, Tahun	7816 Kotak	124,968,000	1 Tahun	124,000,000	1 Tahun	136,400,000	1 Tahun	385,368,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Pemenuhan kebutuhan cetakan dan penggandaan	Bidang, Tahun	6 Bidang	100,000,000	1 Tahun	100,000,000	1 Tahun	110,000,000	1 Tahun	310,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Eksemplar	11080 Eksemplar	56,600,800	1 Tahun	70,000,000	1 Tahun	77,000,000	1 Tahun	203,600,800
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum	Kali, Tahun	48 Kali	53,600,000	1 Tahun	58,960,000	1 Tahun	64,856,000	1 Tahun	177,416,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat-rapat	Kali, Tahun	200 Kali	953,662,620	1 Tahun	850,000,000	1 Tahun	935,000,000	1 Tahun	2,738,662,620
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pengelolaan Informasi dan Domentasi Milik Dinas	Dokumen	1 Dokumen	36,450,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	38,500,000	1 Dokumen	109,950,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan aset BMD	Tahun	1 Tahun	1,806,644,899	1 Tahun	381,000,000	1 Tahun	419,100,000	1 Tahun	2,606,744,899
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	Mobil	3 Mobil	900,000,000						900,000,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	Tahun	1 Tahun	706,644,899	1 Tahun	175,000,000	1 Tahun	192,500,000	1 Tahun	1,074,144,899
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Dinas Kominfo	Tahun	1 Tahun	200,000,000	1 Tahun	206,000,000	1 Tahun	226,600,000	1 Tahun	632,600,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang administrasi kebutuhan terpenuhi	Tahun	1 Tahun	3,507,900,000	1 Tahun	3,922,690,000	1 Tahun	4,314,959,000	1 Tahun	11,745,549,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	Tahun	1 Tahun	20,000,000	1 Tahun	20,000,000	1 Tahun	22,000,000	1 Tahun	62,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayar	Bulan	12 Bulan	440,000,000	1 Tahun	550,000,000	1 Tahun	605,000,000	1 Tahun	1,595,000,000



Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja kebersihan kantor, Jumlah mengadakan senam, Jumlah tenaga kerja tidak tetap	Orang Tenaga Tidak Tetap, Tahun	78 Orang Tenaga Tidak Tetap	3,047,900,000	1 Tahun	3,352,690,000	1 Tahun	3,687,959,000	1 Tahun	10,088,549,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan aset BMD	Tahun	1 Tahun	703,430,000	1 Tahun	893,173,000	1 Tahun	982,490,300	1 Tahun	2,579,093,300
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional	Unit ( Mobil dan Motor)	18 Unit (16 Mobil dan 2 Motor)	423,430,000	20 unit (18 Mobil dan 2 Motor)	513,173,000	20 unit (18 Mobil dan 2 Motor)	564,490,300	20 unit (18 Mobil dan 2 Motor)	1,501,093,300
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan/perengkapan kantor	Kegiatan, Tahun	1 Kegiatan	100,000,000	1 Tahun	100,000,000	1 Tahun	110,000,000	1 Tahun	310,000,000
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah tiang baliho yang terpelihara	Paket	1 Paket	-	1 Tahun	100,000,000	1 Tahun	110,000,000	1 Tahun	210,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	180,000,000	1 Gedung Kantor	180,000,000	1 Gedung Kantor	198,000,000	1 Gedung Kantor	558,000,000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	80%	12,783,910,325	80%	12,786,495,876	100%	14,065,145,464	100%	39,635,551,665
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase informasi yang dikelola dan ditindaklanjuti	%	80%	12,783,910,325	80%	12,786,495,876	80%	14,065,145,464	80%	39,635,551,665
Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase penerapan UU keterbukaan informasi melalui OPD	OPD	48 OPD	206,978,725	48 OPD	200,000,000	48 OPD	220,000,000	48 OPD	626,978,725
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Laporan Opini dan Aspirasi Publik	Survey	Survey	94,915,220	17 kab/Kota	295,000,000	17 kab/Kota	324,500,000	17 kab/Kota	714,415,220
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah pengaduan publik melalui aplikasi lapor	Pengaduan	200 Pengaduan	333,798,780	200 pengaduan	322,000,000	200 pengaduan	354,200,000	200 pengaduan	1,009,998,780
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Iklan Layanan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Kab/Kota, Tahun	17 Kab/Kota	224,800,000	1 Tahun	220,000,000	1 Tahun	242,000,000	1 Tahun	686,800,000
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Informasi melalui Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tahun	1 Tahun	390,000,000	1 Tahun	445,213,658	1 Tahun	489,735,024	1 Tahun	1,324,948,682



**RENSTRA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
2019-2023**

Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Publikasi Melalui media luar ruang	Tahun	1 Tahun	7,167,847,600	1 Tahun	7,100,000,000	1 Tahun	7,810,000,000	1 Tahun	22,077,847,600
Layanan Hubungan Media	Jumlah Penayangan Iklan Layanan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Kab/Kota, Tahun	17 Kab/Kota	520,000,000	1 Tahun	430,000,000	1 Tahun	473,000,000	1 Tahun	1,423,000,000
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Persentase terwujudnya pengembangan dan pemberdayaan kelompok masyarakat	%	100%	158,390,000	100%	145,000,000	100%	159,500,000	100%	462,890,000
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Manunisa yang paham akan bermedia	Tahun	1 Tahun	91,650,000	1 Kali	91,810,318	1 Kali	100,991,350	1 Kali	284,451,668
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah sengketa informasi publik dan jumlah badan publik yang paham akan aktualisasi layanan informasi publik	Sengketa	70 Sengketa	1,200,000,000	70 Sengketa, 17 kab/kota, lebih kurang 200 badan publik	1,400,000,000	70 Sengketa, 17 kab/kota, lebih kurang 200 badan publik	1,540,000,000	70 Sengketa, 17 kab/kota, lebih kurang 200 badan publik	4,140,000,000
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Informasi dan Publikasi melalui Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan	Dokumen, Tahun	3 Dokumen	2,395,530,000	1 Tahun	2,137,471,900	1 Tahun	2,351,219,090	1 Tahun	6,884,220,990
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase akses internet	%	85%	12,371,901,937	87%	4,819,589,600	90%	5,301,548,560	90%	22,493,040,097
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	40%		50%	1,534,250,000	70%	1,687,675,000	70%	15,593,826,937
Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase layanan pengguna berbasis e-government (Pelayanan Publik/ Pemerintah)	%	100%	155,530,696	100%	145,000,000	100%	159,500,000	100%	460,030,696
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase domain dan Subdomain website pemprov. sumsel yang tersedia	Domain (Webportal), Subdomain, Aplikasi	1 Domain (Webportal), 2 Subdomain, 1 Aplikasi	155,530,696	100%	145,000,000	100%	159,500,000	100%	460,030,696
Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pengguna e-government	%	90%	12,216,371,241	90%	6,208,839,600	90%	6,829,723,560	90%	25,254,934,401
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pengguna Command Center dan Layanan Data	Tahun, %	1 Tahun	450,000,000	100%	430,000,000	100%	473,000,000	100%	1,353,000,000
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Data Center	Data Center, Tahun	1 Data Center	3,290,000,000	1 Tahun	600,000,000	1 Tahun	660,000,000	1 Tahun	4,550,000,000

Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Kapasitas Layanan Bandwith Internet	Mbps	600 Mbps	4,130,000,000	600 Mbps	4,500,000,000	600 Mbps	4,950,000,000	600 Mbps	13,580,000,000
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Monitoring dan Evaluasi Lokasi Internet	Lokasi dengan masing-masing desa 5 Mbps, Dokumen	68 Lokasi dengan masing-masing desa 5 Mbps	3,727,500,000	1 Dokumen	319,589,600	1 Dokumen	351,548,560	1 Dokumen	4,398,638,160
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pertemuan Dewan TIK Daerah Sumatera Selatan	Orang, Tahun	200 Orang	164,484,741	1 Tahun	145,000,000	1 Tahun	159,500,000	1 Tahun	468,984,741
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Persentase OPD dan aplikasi yang di monitoring dan evaluasi SPBE	OPD dan Kab/Kota,Aplikasi	48 OPD dan Kab/Kota,Aplikasi	454,386,500	48OPD dan 17 kab/kota	214,250,000	48OPD dan 17 kab/kota	235,675,000	48OPD dan 17 kab/kota	904,311,500
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100%	606,500,000	100%	632,599,648	100%	695,859,613	100%	1,934,959,261
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%			100%	90,000,000	100%	99,000,000	100%	189,000,000
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase data yang tersedia			606,500,000	100%	722,599,648	100%	794,859,613	100%	2,123,959,261
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Data perangkat daerah yang berkualitas	Dokumen	1 Dokumen	205,000,000	1 Dokumen	172,800,000	1 Dokumen	190,080,000	1 Dokumen	567,880,000
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Kab/Kota yang terbina	kab/Kota	17 kab/Kota	49,500,000	17 Kab/Kota	55,144,000	17 Kab/Kota	60,658,400	17 Kab/Kota	165,302,400
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PAD Diskominfo	Dokumen	1 Dokumen	84,000,000	1 Dokumen	90,000,000	1 Dokumen	99,000,000	1 Dokumen	273,000,000
Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Dokumen/ Aplikasi Satu Data Sumatera Selatan	Dokumen/Aplikasi	1 Dokumen/Aplikasi	268,000,000	1 Dokumen	404,655,648	1 Dokumen	445,121,213	1 Dokumen	1,117,776,861
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	%	80%	128,787,019	100%	345,665,350	100%	380,231,885	100%	854,684,254



Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	%	100%	59,787,019	1 Tahun	250,665,350	1 Tahun	275,731,885	1 Tahun	586,184,254
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tahun			1 Tahun	95,000,000	1 Tahun	104,500,000	1 Tahun	199,500,000
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Keamanan Informasi CSIRT	Kegiatan, Tahun	1 Kegiatan	59,787,019	1 Tahun	155,665,350	1 Tahun	171,231,885	1 Tahun	386,684,254
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah koordinasi persandian di daerah	kab/kota	17 kab/kota	69,000,000	17 kab/kota	95,000,000	17 kab/kota	104,500,000	17 kab/kota	268,500,000
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Unit Teknis Persandian Kab/ Kota Penyelenggaraan Pengamanan Persandian sesuai dengan SOP	Kab/Kota	17 Kab/Kota	69,000,000	17 kab/kota	95,000,000	17 kab/kota	104,500,000	17 kab/kota	268,500,000
				41,451,567,600		36,734,466,474		40,407,913,121		130,965,849,132



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berikut ini adalah indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023:

**Tabel 7. 1 (TC – 28)**  
**Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	
	<b>Urusan Komunikasi dan Informatika</b>							
	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	90%	3,241	3,241	3,300	3,550	3,600	16,932
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	85%	480	480	550	560	580	2,650
	Persentase Aparatur yang Meningkatkan Kapasitasnya	95%	221	221	240	250	260	1,192
	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	na	-	80	-	125	-	205
	Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkatkan/Berkembang	80%	220	220	242	240	250	1,172
	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Informasi dan Komunikasi Masyarakat/Publik	1	2,053	3,673	5,000	5,475	6,000	22,201
	Persentase Akses Internet	90%	11,050	11,030	11,050	11,025	11,050	55,205
	Program Pengelolaan Informasi Publik dan Media Massa		7,200	4,070	3,868	4,600	5,560	25,298
	Persentase Informasi Diterima	100%						-
	Persentase Aduan Ditindaklanjuti	23.31%						-
	Persentase Layanan Penggunaan E-Government	na	1,069	1,285	1,750	2,175	2,700	8,979
	<b>Urusan Statistik</b>							
	Persentase Data Sektoral yang Tersedia	na	750	-	-	-	-	750
	Jumlah Data Sektoral yang Tersedia	na	-	2,500	3,000	3,500	4,000	13,000
	<b>Urusan persandian</b>							
	Persentase penyelenggaraan pengamanan informasi (Keamanan Informasi)	100%	200	-	-	-	-	200
	Jumlah penyelenggaraan pengamanan informasi (Keamanan Informasi)	100%	-	300	400	500	600	1,800

**Revisi Tabel 7. 1 (TC – 28)**  
**Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN (juta)					KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD
			TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	
Urusan Komunikasi dan Informatika								
1	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran terpenuhi				17,221	17,384	19,123	53,728
2	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota				12,971	12,040	13,243	38,254
3	Persentase akses internet				8,313	9,144	10,059	27,516
4	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi				6,204	6,824	7,507	20,535
Urusan Statistik								
5	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				528	580	639	1,747
6	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah				84	92	102	278
Urusan Persandian								
7	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah				189	208	228	625



## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 - 2023 merupakan rencana tindak yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan dalam kurun waktu lima tahun untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dibidang komunikasi dan infomatika.

Renstra ini hanyalah dokumen perencanaan, sebagus apapun isi dari Renstra tidak akan mampu merubah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan menjadi OPD yang hebat dan berhasil mewujudkan visi dan misinya tanpa adanya komitmen dan upaya sungguh-sungguh dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan untuk menerapkannya. Menjadi sangat penting untuk diikrarkan oleh kita semua jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, bahwa program dan kegiatan yang telah disusun dalam Renstra menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka terwujudnya *good governance* guna menuju Sumatera Selatan Maju Untuk Semua melalui komunikasi dan informatika.